

**LAPORAN
PENELITIAN SOSIAL BUDAYA DAN HUMANIORA**



**KONTRADISKURSUS RADIKALISME
MELALUI MEDIA ONLINE
(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough mengenai Isu-isu
Radikalisme di suaramuhammadiyah.id dan NU Online)**

Oleh;
Dr. Said Romadlan, S.Sos., M.Si. (0326097402)

Nomor Surat Kontrak Penelitian: 255/F.03.07/2021
Nilai Kontrak: Rp. 8.000.000

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2021

LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN SOSIAL BUDAYA dan HUMANIORA (PSBH)

Judul Penelitian

Kontradiskursus Radikalisme melalui Media Online (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough mengenai Isu-isu Radikalisme di suaramuhammadiyah.id dan NU Online)

Ketua Peneliti : Dr. Said Romadlan, M.Si.

Link Profil simakip : <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/918>
Contoh link: <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/978>

Fakultas /Program Studi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi

Anggota Peneliti :Click or tap here to enter text.

Link Profil simakip :Click or tap here to enter text.

Anggota Peneliti :Click or tap here to enter text.

Link Profil simakip :Click or tap here to enter text.

Nama Mahasiswa : Dimas Prasetyo Wibisono NIM: 1706015235

Zulfa Triwahyuningsih NIM: 1706015187

Waktu Penelitian : 6 Bulan

Pilihan Fokus Riset UHAMKA

Fokus Penelitian UHAMKA: Sosial Humaniora

Luaran Penelitian

Luaran Wajib : Jurnal Nasional Terakreditasi sinta 2 Status minimal: **in review**

Luaran Tambahan : Prosiding Seminar Nasional Status minimal: **submitted**

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Farida Hariyati, S.IP., M.I.Kom.
NIDN. 0327097601



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Tellys Corliana, M.Hum.
NIDN. 0329096403

Ketua Peneliti



Dr. Said Romadlan, M.Si.
NIDN. 0326097402

Ketua Lemlitbang UHAMKA

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd
NIDN. 0020116601



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 299 / F.03.07 / 2021
Tanggal : 19 April 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Suswandari, M.Pd**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; **Dr. SAID ROMADLAN S.Sos., M.Si.**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2020/2021.

Fasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **KONTRADISKURSUS RADIKALISME MELALUI MEDIA ONLINE (ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH MENGENAI ISU-ISU RADIKALISME DI SUARAMUHAMMADIYAH.ID DAN NU ONLINE)** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Batch 1 Tahun 2020 melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

Bukti luaran penelitian wajib dan tambahan harus sesuai sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1, Luaran penelitian yang dimaksud di lampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan akhir penelitian yang diunggah melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 3

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 19 April 2021 dan selesai pada tanggal 20 November 2021.

Pasal 4

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.8.000.000,- (Terbilang : *Delapan Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;

(1) Termin I 50 % : Sebesar 4.000.000 (Terbilang: *Empat Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1 yang dilengkapi dengan tanda tangan asli dekan dan ketua program studi.

(2) Termin II 50 % : Sebesar 4.000.000 (Terbilang: *Empat Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengikuti proses monitoring dan evaluasi serta mengunggah laporan akhir penelitian dengan melampirkan bukti luaran penelitian wajib dan tambahan sesuai Pasal 1 ke simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.

(3) PIHAK PERTAMA akan menunda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen)

Jakarta, 19 April 2021

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Dr. SAID ROMADLAN, S.Sos., M.Si.



Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. ZAMAH SARI M.Ag.

RINGKASAN

Pascareformasi tahun 1998 menjadi titik balik kebangkitan kelompok-kelompok muslim radikal di Indonesia. Di ranah publik, diskursus kelompok muslim radikal ini juga menguat dalam mewacanakan sistem pemerintahan khilafah pengganti Pancasila sebagai dasar negara, jihad sebagai perang terhadap kaum kafir, dan intoleransi terhadap non-muslim. Diskursus radikalisme di media online harus dilawan dengan kontradiskursus radikalisme di ranah yang sama yakni melalui media online. Maka dari itu peran media online dari kelompok-kelompok Islam moderat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sangat dibutuhkan untuk menandingi diskursus kelompok-kelompok muslim radikal ini. Permasalahan penelitiannya adalah bagaimana bentuk-bentuk kontra-diskursus radikalisme melalui media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online? Tujuan penelitiannya untuk menunjukkan bentuk-bentuk kontra-diskursus radikalisme melalui media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang memfokuskan analisisnya pada tiga level, yaitu (1) analisis teks, (2) analisis praktik diskursus dan (3) analisis sosio-kultural (konteks). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kontra-diskursus radikalisme suaramuhammadiyah.id mengenai dasar negara adalah merepresentasikan Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (negara kesepakatan dan kesaksian) dan jihad sebagai *jihad lil-muwajahah* (bersungguh-sungguh menciptakan sesuatu yang unggul). NU Online merepresentasikan Pancasila itu islami, tidak ada pertentangan Islam dengan Pancasila, dan menampilkan pemaknaan jihad secara kontekstual seperti jihad melawan korupsi, melawan narkoba, melawan hoaks, dan sebagainya. Diskursus yang ditampilkan suaramuhammadiyah.id dan NU Online merupakan kontra-diskursus mengenai Negara Islam dan jihad sebagai perang atau kekerasan yang diwacanakan kelompok-kelompok muslim radikal. Rekomendasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kekuatan bagi warga Muhammadiyah dan NU untuk melawan radikalisme, termasuk melakukan kontra-diskursus radikalisme melalui media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, dan dipresentasikan di konferensi nasional.

Kata Kunci: Kontradiskursus radikalisme, suaramuhammadiyah.id, NU online, Pancasila, jihad.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT KONTRAK PENELITIAN	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Masalah Penelitian	3
c. Tujuan Penelitian	3
d. Urgensi Penelitian	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
a. State of the Art	5
b. Diskursus dan Kontra-Diskursus	8
c. Roadmap Penelitian	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	11
a. Pendekatan dan Metode Penelitian	11
b. Penentuan Media dan Narasumber	11
c. Metode Pengumpulan Data	12
d. Metode Analisis Data	13
e. Alur, Luaran, dan Indikator Capaian	13
f. Lokasi Penelitian	14
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
a. Deskripsi Singkat suaramuhammadiyah.id dan NU Online	15
b. Hasil Penelitian	17
c. Pembahasan	77
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	84
BAB 6. LUARAN YANG DICAPAI	89
BAB 7. RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isi suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Dasar Negara	17
Tabel 2. Isi suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Jihad	19
Tabel 3. Analisis Teks suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Dasar Negara Pancasila	40
Tabel 4. Analisis Teks suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Jihad	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Roadmap Penelitian	10
Gambar 2. Dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough	13
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Luaran Hasil Penelitian (Artikel Ilmiah)	98
Lampiran 2. Luaran Paper Konferensi Internasional	118
Lampiran 3. Publikasi Media Massa Sindonews	133

BAB 1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pascareformasi tahun 1998 menjadi momentum titik balik kebangkitan kelompok muslim radikal di Indonesia. Kebangkitan kelompok muslim radikal pasca-Orde Baru ini disebut sebagai *conservative turn*, yakni titik balik kebangkitan kelompok muslim konservatif yang ditandai dengan pengambilalihan terhadap kelompok muslim mainstream, di mana pemikiran-pemikiran liberal dan progresif di tubuh Muhammadiyah dan NU mulai ditolak. Termasuk kecenderungan di tubuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa dekade yang mulai menjadi lebih konservatif (Burhani, 2013; Ichwan, 2013; Van Bruinessen, 2013). Di sisi yang lain, kebangkitan kelompok muslim radikal juga ditandai dengan terlibatnya mereka dalam berbagai konflik antar-agama di daerah-daerah di Indonesia, munculnya kelompok-kelompok jihadis yang mengobarkan perang dan kekerasan, dan munculnya tindakan terorisme yang menyerang berbagai tempat, hotel, pariwisata, dan gereja (Van Bruinessen, 2013).

Pada saat yang sama, diskursus muslim radikal (radikalisme) juga berkembang secara dominan di ranah publik (Hasan, 2005). Mereka melakukan “dakwah publik” sebagai upaya islamisasi segala aspek kehidupan yang dipelopori oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Fuad, 2015). Disebut radikalisme karena menurut Dawisha (Azra, 2016), mereka memiliki sikap jiwa yang membawa pada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan menggantinya dengan sistem baru. Kelompok-kelompok Islamis (radikal) ini dengan semangat mewacanakan pemahaman mereka mengenai sistem pemerintahan, jihad, dan toleransi secara langsung maupun melalui media-media online yang mereka miliki, yang cenderung radikal. Mereka mewacanakan sistem pemerintahan khilafah, yakni sistem pemerintahan yang merujuk pada khulafaurrasyidin pasca wafatnya Rasulullah (Azra, 2016), sebagai pengganti demokrasi Pancasila, jihad sebagai perang atau tindak terorisme terhadap kaum kafir, dan intoleransi terhadap non-muslim.

Pada perkembangannya, seiring dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, gerakan-gerakan radikalisme juga mengubah strateginya dengan menggunakan semacam strategi baru, dengan tidak lagi hanya mengandalkan forum-forum publik, atau demonstrasi-demonstrasi turun ke jalan, tapi mulai menggunakan media-media online dan media sosial sebagai alat perjuangannya. Mereka menyasar kalangan atau kelompok muda seperti mahasiswa di kampus-kampus yang memang dekat dengan teknologi atau media baru ini (Afrianty, 2012). Media online mereka menjadi ladang penyemaian benih-benih pemahaman radikal melalui diskursus yang mereka munculkan (Karman, 2015). Bahkan dalam perkembangan, mereka juga menggunakan media-media sosial seperti Youtube, Twitter, Instagram, dan sebagainya sebagai media penyebaran pandangan radikal (Muthohirin, 2015).

Diskursus radikalisme di media online harus dilawan dengan diskursus antiradikalisme atau kontradiskursus radikalisme di ranah yang sama yakni media online. Maka dari itu peran media online dari kelompok-kelompok Islam moderat (*washithiyah* atau tengahan) seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sangat dibutuhkan untuk menandingi diskursus kelompok-kelompok muslim radikal, dengan memunculkan kontra-diskursus radikalisme. Sebagaimana dikenal selama ini, Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi Islam moderat di Indonesia dan menjadi kekuatan sipil Islam yang konsisten memperjuangkan tumbuhnya nilai-nilai demokrasi (Burhani, 2012; Hilmy, 2013; Nashir et al., 2019). Bahkan Muhammadiyah dan NU dapat dianggap sebagai warisan keagamaan dunia (Maman A. Majid Binfas et al., 2018). Meskipun Muhammadiyah dan NU secara historis dan kultur memang berbeda (Maman Abdul Majid Binfas et al., 2014), tapi keduanya kini diklaim sebagai organisasi Islam moderat (*wasithiyah*). Muhammadiyah mengusung jargon Islam Berkemajuan dan NU mengibarkan slogan Islam Nusantara.

Media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online merupakan media resmi organisasi Islam Muhammadiyah dan NU yang berfungsi sebagai semacam “corong” yang melantangkan suara-suara resmi dan kepentingan kedua organisasi Islam tersebut (Saputra & Nazim, 2017; Sukmono & Junaedi,

2020). Tujuan suaramuhammadiyah.id adalah (1) merekam denyut Muhammadiyah, (2) memperkenalkan profil dan kontribusi Muhammadiyah pada masyarakat dunia, (3) menyebarkan syiar Islam Berkemajuan, dan (4) mendorong produktivitas dan kreativitas kajian tentang Muhammadiyah dan Islam. Sedangkan tujuan utama NU Online adalah mewartakan pandangan ke-Islaman Nahdliyah atau Aswaja.

Sebagai media resmi Muhammadiyah dan NU, keberadaannya tentu sangat strategis dalam konteks kontra-diskursus radikalisme. Satu sisi secara internal kedua berperan sebagai media yang memberikan pemahaman tentang nilai-nilai keislaman Muhammadiyah dan NU kepada masing-masing warganya, termasuk mengenai isu-isu radikalisme seperti dasar negara dan jihad. Di sisi lain secara eksternal, suaramuhammadiyah.id dan NU Online berperan sebagai alat untuk melawan pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan pandangan keislaman Muhammadiyah dan NU, termasuk melawan pandangan radikalisme yang berkembang di Indonesia saat ini.

b. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana bentuk-bentuk kontra-diskursus radikalisme melalui media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online?

c. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah menunjukkan adanya kontra-diskursus radikalisme melalui media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online, sebagai media online resmi organisasi Islam moderat Muhammadiyah dan NU.

d. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi secara sosial yakni dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai adanya pemahaman

yang tidak sesuai (radikalisme) yang mesti ditandingi atau dilawan. Di samping itu juga menunjukkan adanya peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat dalam melawan diskursus radikalisme sekaligus peran keduanya dalam menyemaikan ajaran Islam yang rahmatan lil-alamin melalui media online keduanya. Secara akademis penelitian ini memiliki urgensi dalam mengembangkan kajian mengenai diskursus dan kontra-diskursus sebagai kajian penggunaan bahasa di media online.

Penelitian ini merupakan skema Penelitian Sosial Budaya dan Humaniora (PSBH) yang mengkaji dan berupaya mengungkap permasalahan sosial budaya, khususnya persoalan radikalisme agama sebagai salah satu permasalahan bangsa dan dunia beberapa dekade terakhir ini. Secara khusus penelitian ini berupaya menunjukkan upaya perlawanan terhadap radikalisme dalam bentuk kontra-diskursus melalui media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

a. State of the Art

Kajian mengenai kontra-diskursus radikalisme atau semacam kontradikalisme dan deradikalisasi di berbagai jenis media online secara umum memang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pertama oleh pertama, Zainal Fikri, yang mengkaji mengenai Narasi Deradikalisasi di Media Online Republika dan Arrahmah (2013). Penelitian ini menemukan bahwa Republika memberitakan deradikalisasi adalah upaya pencegahan ideologi radikal dan meluruskan pemahaman Islam. Sedangkan bagi Arrahmah, deradikalisasi adalah bagian dari perang terhadap Islam dan membelokkan ajaran Islam (Fikri, 2013).

Kedua, studi oleh Nafi' Muthohirin yang berjudul Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial (2015). Hasil kajian menunjukkan adanya peran yang sangat signifikan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai arena baru penyemaian dan propaganda kelompok-kelompok Islam radikal seperti HTI dan Jamaah Salafi. Sasarannya adalah kaum muda yang memang dekat dengan media-media sosial sehingga pesan-pesan radikalisme lebih mudah diterima (Muthohirin, 2015).

Ketiga, kajian oleh Taufiqur Rahman yang berjudul *Contextualizing jihad and mainstream Muslim identity in Indonesia: the case of Republika Online* (2017). Hasil kajian ini menunjukkan upaya kontra-diskursus melalui media Republika online dengan mengkontekstualisasikan pemahaman makna mengenai jihad oleh kelompok muslim moderat di Indonesia, Muhammadiyah dan NU dengan menafsirkan jihad dengan makna non-kekerasan. Salah satu bentuk kontesktualisasi makna jihad sebagai upaya deradikalisasi adalah memaknai jihad dalam bentuk pemberdayaan komunitas muslim di bidang pendidikan dan ekonomi melalui organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU (Rahman, 2017).

Keempat, Rina Sari Kusuma dan Nur Azizah, dengan kajian yang berjudul Melawan Radikalisme melalui Website (2018), yang mengkaji tiga website

Pusat Media Damai (PMD) yaitu jalandamai.org, damailahindonesiaku.com, dan damai.id. Kajian ini bertujuan untuk melihat perlawanan terhadap radikalisme yang ditunjukkan dalam ketiga website tersebut yang menggambarkan adanya dua tahapan perlawanan yaitu penyebaran radikalisme secara sensitif dan upaya penangkalannya (Kusuma & Azizah, 2018).

Kelima, studi yang dilakukan oleh Muhammad Nurrohman yang berjudul *Analisis isi media NU online tentang radikalisme* (2019), yang menunjukkan adanya konten yang melakukan perlawanan terhadap radikalisme, salah satunya seperti yang dipublikasikan di NU Online. NU Online menjadi salah satu media online yang tidak setuju dengan gagasan radikalisme. Alasan tersebut diperkuat dengan adanya tujuh artikel dan berita di website www.nu.or.id. (Nurrohman, 2019).

Keenam, studi yang dilakukan oleh Riyan Fadli tentang *Kontra Radikalisme Agama di Dunia Maya (Studi Analisis Portal Online Organisasi Islam dan Pemerintah)* (2019). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kontra-radikalisme agama yang dilakukan lewat portal online memiliki perbedaan cukup signifikan. Dari ketiga portal online, intensitas yang cukup tinggi dilakukan oleh Dutaislam.com dalam melakukan kontra radikalisme agama, sedangkan Sangpencerah.id menjadi portal online yang tidak produktif. Dalam postingan Nu.or.id postingannya masih normatif dalam hal kontra radikalisme agama dan lebih banyak menampilkan berita acara. Nu.or.id lebih banyak melakukan pembelaan terhadap persoalan yang berhubungan dengan NU, redaksi lebih banyak melakukan kontra radikalisme secara umum, tidak spesifik membahas isu radikal. Dutaislam.com melakukannya dengan keras, redaksi memanfaatkan keragaman majas, dan bahasa yang digunakan redaksi pun cukup menyentil hingga membuat postingan mereka lebih menarik (Fadli, 2019).

Ketujuh, studi oleh Yani Tri Wijayanti yang berjudul *Radicalism Prevention through Propaganda Awareness on Social Media* (2020). Hasil kajian menunjukkan bahwa propaganda awareness penting dilakukan karena mampu meningkatkan kesadaran terhadap informasi-informasi yang mengandung radikalisme yang disebarkan melalui media sosial sehingga mampu

menyegah sekaligus melindungi siswa dari paparan radikalisme (Wijayanti, 2020).

Kedelapan, kajian yang dilakukan oleh Sefriyono mengenai Jihad Digital: Pembimbingan Narasi Kontra Radikalisasi NU Online di Dunia Maya (2020). Hasil studi menunjukkan bahwa NU Online mendiagnosis, narasi-narasi radikalisasi dan intoleran di dunia maya merupakan sumber kegaduhan ideologi bangsa dan disharmoni hubungan antar agama. Dalam strategi prognosisnya, NU Online mengembangkan narasi-narasi seperti Islam sangat sesuai dengan Pancasila. Sementara dalam strategi motivasionalnya, NU Online mengajak semua elemen bangsa untuk mempertahankan integrasi bangsa (Sefriyono, 2020).

Kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa media online atau media yang berbasis internet (internet based) menjadi medium baru kelompok-kelompok muslim radikal untuk menyebarluaskan pandangan ideologis mereka. Kelompok-kelompok muslim radikal menggunakan internet sebagai medium yang efektif dan efisien menjadikan radikalisme dan fundamentalisme sebagai isu global (Khatib, 2019).

Di sisi lain, penelitian-penelitian di atas juga menunjukkan adanya perlawanan atau upaya-upaya deradikalisasi oleh media-media online tertentu. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengenai peran media online milik Muhammadiyah dan NU, yakni suaramuhammadiyah.id dan NU Online dalam melawan radikalisme belum banyak dilakukan. Sebagai media resmi yang dimiliki oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, semestinya kajian mengenai peran kedua media online tersebut dalam mencegah radikalisme banyak dilakukan. Namun demikian kajian-kajian mengenai peran media online lebih banyak difokuskan pada media lain selain yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan NU. Maka dari itu, penelitian ini berupaya menunjukkan peran kedua media online resmi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dalam pencegahan radikalisme dalam bentuk kontra-diskursus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme yang ditampilkan dalam kedua media online tersebut.

b. Diskursus dan Kontra-Diskursus

Penelitian ini menggunakan teori atau konsep mengenai diskursus sebagai landasan teoritisnya. Istilah diskursus atau wacana dipopulerkan oleh Michel Foucault. Diskursus merupakan keseluruhan domain (bidang) yang mana bahasa digunakan dengan pola-pola tertentu. Diskursus dapat diartikan sebagai keseluruhan wilayah konseptual di mana pengetahuan diciptakan atau dibentuk, dan diproduksi (Lubis, 2014). Istilah diskursus dapat digunakan dalam konteks yang luas dan dipakai untuk beberapa disiplin. Diskursus meliputi dua bidang, pertama dalam studi bahasa. Diskursus dapat dipahami dalam bentuk interaksi dan tindakan sosial antarindividu yang berinteraksi bersama-sama dalam sebuah situasi sosial. Kedua, diskursus dapat juga dipakai di dalam kajian post-strukturalis sebagai konstruksi realitas sosial (Fairclough, 1995, 2013).

Diskursus juga dapat dilihat sebagai relasi pada komunikasi antara orang-orang dalam bentuk berbicara, menulis, dan cara-cara komunikasi yang lain, dan menjelaskan juga relasi antara peristiwa-peristiwa komunikatif (percakapan, surat kabar, artikel) (Fairclough, 2010). Diskursus dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap teks, adalah setiap bahasa yang dibakukan lewat tulisan. Maka, diskursus selalu berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Bahasa dalam diskursus dianggap sebagai peristiwa (*event*), yakni bahasa yang membicarakan sesuatu (Ricoeur, 2006). Jadi, diskursus adalah bahasa ketika ia digunakan untuk berkomunikasi (Permata, 2013).

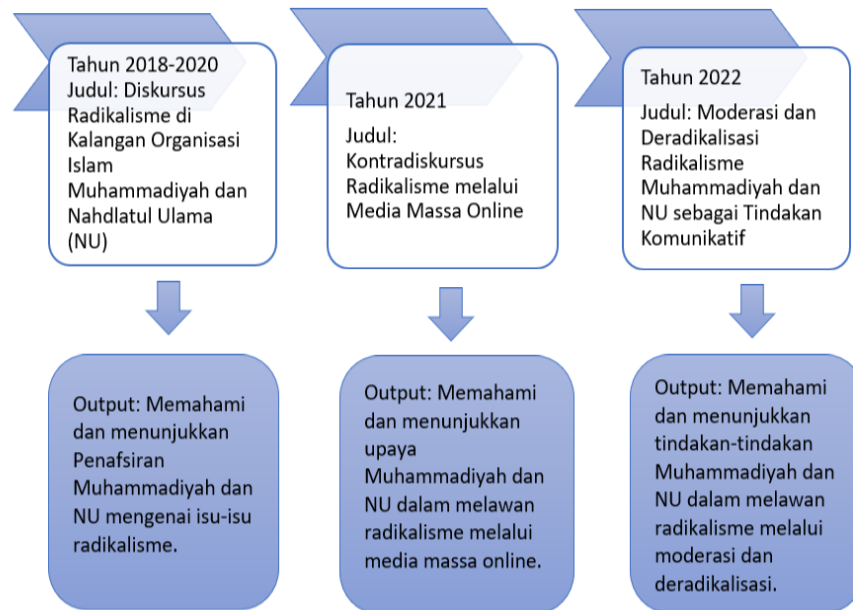
Adapun kontra-diskursus adalah semacam perlawanan dengan memproduksi diskursus tandingan. Bila diskursus merujuk pada dunia yang digambarkan, yang diungkapkan, dan yang diinterpretasikan (Ricoeur, 2006), maka begitu juga dengan kontra-diskursus. Tetapi dalam kontra-diskursus apa yang digambarkan dan diinterpretasikan berbeda dengan apa yang digambarkan dan diinterpretasikan dalam diskursus. Sebagai contoh, istilah Occidentalism sebagai kontra-diskursus istilah orientalism, atau dalam posisi biner seperti West-East, Self-Other, Oppressed-Oppressor (Sorensen & Chen, 1996). Kontra-diskursus juga dapat berbentuk misalnya istilah post-colonial sebagai kontra-diskursus kolonialisme dan imperialisme (Tiffin, 1987). Dalam pandangan

Foucault kontra-diskursus berkaitan dengan kelompok yang sebelumnya tidak bersuara kemudian mulai mengartikulasikan keinginan mereka untuk melawan dominasi wacana otoritatif yang berlaku (Moussa & Scapp, 1996).

Kontra-diskursus radikalisme dalam konteks ini dilakukan di media baru. Media baru adalah media yang berbasis pada internet. Teknologi yang menyediakan konvergensi, jaringan digital, jangkauan global, interaktifitas, komunikasi many-to-many, dan bentuk-bentuk media yang seseorang dapat menjadi produser sekaligus konsumen (Flew, 2005). Media baru sebenarnya mengacu pada perubahan-perubahan yang luas dalam produksi media, distribusi, dan penggunaannya, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi dan konvergensi (Flew, 2005; McQuail, 2010). Media baru diidentikkan dengan digital, interaktif, hipertekstual, virtual, jaringan, dan simulasi (Lister et al., 2009). Karakteristik media baru yang membedakannya dengan media konvensional adalah interaktifitas, presentasi sosial, pengayaan media, otonomi, penuh kesenangan, privasi, dan personalisasi (McQuail, 2010). Dalam konteks penelitian ini, media baru tersebut adalah suaramuhammadiyah.id dan NU Online.

c. Roadmap Penelitian

Roadmap (peta jalan) penelitian yang telah dan akan dilakukan oleh peneliti dirancang sebagai berikut: pertama tahun 2018-2020 peneliti fokus pada penelitian mengenai Diskursus radikalisme di kalangan organisasi Islam Muhammadiyah dan NU. Kedua, tahun 2021 peneliti mengajukan penelitian mengenai Kontra-diskursus radikalisme melalui media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai media online resmi Muhammadiyah dan NU. Ketiga, tahun 2022 peneliti merancang penelitian yang berkaitan dengan tindakan moderasi Muhammadiyah dan Deradikalisme NU dalam melawan radikalisme sebagai tindakan komunikatif. Secara lebih jelas roadmap peneliti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Roadmap Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena kedudukan penelitian didasarkan atas interpretasi subyek, dan temuan penelitian terikat konteks (waktu dan tempat). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2009). Penelitian ini menggunakan metode Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough yang memusatkan perhatian pada bahasa sebagai praktik kekuasaan, karena bahasa terbentuk dan dibentuk dari relasi dan konteks sosial tertentu. Penelitian ini memakai Analisis Wacana Kritis Fairclough karena selain relevan dengan permasalahan penelitian, juga karena metode ini disebut model “perubahan sosial” yang mengintegrasikan analisis linguistik dengan pemikiran sosial dan politik, sehingga analisisnya lebih komprehensif. Analisis wacana kritis Fairclough memiliki tiga dimensi analisis, yakni teks, praktik wacana (discourse practice), dan praktik sosiokultural. Teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosa-kata, semantik, tata kalimat, koherensi, kohesivitas. Sedangkan discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Adapun sociocultural practice adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks (Fairclough, 1995).

b. Penentuan Media dan Narasumber

Untuk penentuan narasumber dan media online dilakukan berdasarkan kriteria. Narasumbernya adalah redaktur suaramuhammadiyah.id dan redaktur NU Online, dan dilengkapi dengan ahli atau pakar yang kompeten. Sedangkan media online yang dipilih dalam penelitian ini adalah media resmi Muhammadiyah dan NU, yakni suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Kedua media ini dipilih karena selain keduanya berbasis internet, kedua media online ini merupakan media resmi dan menjadi representasi Muhammadiyah dan NU yang berfungsi sebagai semacam “corong” yang melantangkan suara-

suara resmi dan kepentingan kedua organisasi Islam tersebut (Saputra & Nazim, 2017; Sukmono & Junaedi, 2020). Rentang waktu yang dipilih adalah selama 5 tahun, yakni mulai Januari 2016 sampai Desember 2020. Adapun unit analisisnya adalah berita, artikel, opini, dan tajuk. Sedangkan unit pengamatannya adalah judul, isi, dan sumber dari berita, artikel, opini, dan tajuk yang dimuat di kedua media online tersebut selama waktu yang telah ditentukan.

c. Metode Pengumpulan Data

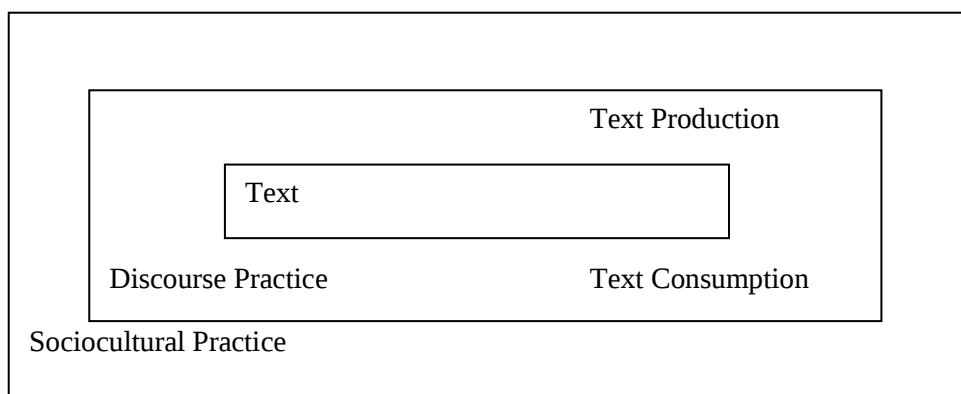
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara mendalam atau wawancara tidak terstruktur, dan kajian Pustaka. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis data (Kriyantono, 2009). Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk pemberitaan media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online mengenai radikalisme dan kontraradikalisme. Termasuk dokumen dalam bentuk tanfidz keputusan muktamar, Munas, Tanwir, dan dokumen-dokumen relevan lainnya.

Sedangkan wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar (Denzin & Lincoln, 2009). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau wawancara tidak berstruktur yang secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai percakapan antara peneliti (seseorang yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu subyek) dan seorang informan (seseorang yang dianggap memiliki informasi). Dalam wawancara tidak berstruktur ini peneliti fokus dan mencoba mendapatkan informasi, tetapi dengan kontrol yang relatif bebas terhadap informan (Berger, 2011). Wawancara mendalam untuk menggali data dari narasumber berkaitan dengan kontra-diskursus radikalisme melalui media online, terutama mengenai praktik diskursus dan konteks sosiokultural yang melingkupi proses pembuatan teks. Adapun pengumpulan data dengan studi Pustaka dilakukan dalam bentuk pengumpulan kajian-kajian yang berkaitan dengan kontra-diskursus

radikalisme terdahulu yang dapat diperoleh melalui literatur seperti hasil penelitian, jurnal, dan buku-buku referensi.

d. Metode Analisis Data

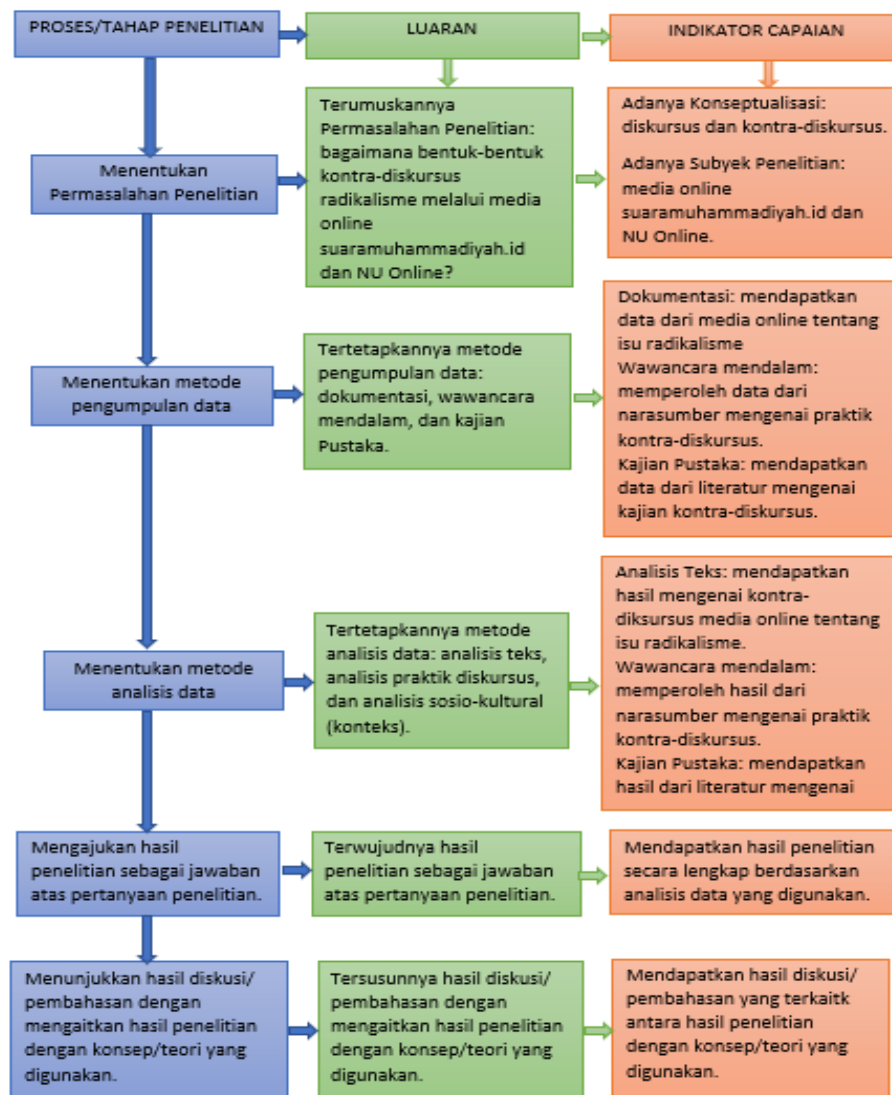
Untuk metode analisis data penelitian ini menggunakan tiga level analisis mengikuti model Analisis Wacana Kritis Fairclough, yaitu analisis teks, analisis praktik diskursus, dan analisis sosio-kuktural. Analisis teks dilakukan dengan analisis *critical linguistic* untuk memahami aspek-aspek semantik yang digunakan di media online. Analisis praktik diskursus merupakan analisis terhadap hasil wawancara mendalam dengan narasumber untuk memahami proses pembuatan teks dan latar belakangnya. Analisis praktik sosiokultural, yang mengaitkan antara teks, praktik diskursus dengan konteks atau kondisi sosiokultural yang terjadi saat teks disusun untuk memahami konteks kontra-diskursus radikalisme saat ini.



Gambar 2. Dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (Fairclough, 1995)

e. Alur, Luaran, dan Indikator Capaian Penelitian

Alur proses penelitian, luaran, dan indikator capaian penelitian digambarkan dalam gambar diagram alir berikut.



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

f. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, dan Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Singkat *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online

Media online *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online merupakan media resmi yang berbasis internet dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai media resmi, kedua media online ini menyuarakan pandangan-pandangan keagamaan dari Muhammadiyah dan NU yang cenderung moderat (*washitiyah*). Muhammadiyah dan NU diposisikan sebagai organisasi Islam moderat karena pertama, ketidaksetujuan mereka dengan pandangan dan sikap keagamaan kelompok Islam yang memakai cara-cara kekerasan, atau secara revolusioner-radikal. Kedua, sejak awal kedua organisasi ini menentang gagasan negara Islam. Bagi Muhammadiyah dan NU, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dipandang sudah sesuai dengan substantif ajaran Islam sebagai agama rahmat lil ‘âlamîn. Selain itu, Muhammadiyah dan NU juga menerima menerima nilai-nilai modernitas, termasuk nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Hilmy, 2012). Maka dari itu, isi dari *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online sebagian besar merupakan representasi dari pandangan-pandangan ke-Islaman Muhammadiyah dan NU yang moderat. Selain tentu saja kedua media online tersebut membawa misi ke-Muhammadiyah bagi Muhammadiyah dan *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) bagi NU.

Suaramuhammadiyah.id merupakan versi digital dari Majalah Suara Muhammadiyah sebagai respon atas perkembangan era digital di dunia pers. Selain dalam bentuk versi digital, Majalah Suara Muhammadiyah juga menyediakan *podcast* sebagai adaptasi kemajuan teknologi dan komunikasi dewasa ini (Sukmono & Junaedi, 2020). Majalah Suara Muhammadiyah sendiri merupakan salah satu majalah yang memiliki sejarah panjang lintas zaman. Dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Haji Fachroedin, Majalah Suara Muhammadiyah (Soeara Moehammadijah) pertama kali terbit pada bulan Dzulhijjah tahun 1333 H (1915 M). Pemimpin redaksi (*hoofdredacteur*) pertama

adalah Haji Fachroedin. Pertama kali terbit, Suara Muhammadiyah hadir sebagai majalah bulanan dengan bahasa Jawa di bawah manajemen Bagian Taman Pustaka Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah Yogyakarta¹.

Suara Muhammadiyah memilikinya dengan SIT Deppen No. 19/SK/DPHM/SIT/1965 tanggal 2 September 1965. Nomor perdana, edisi ber-SIT diedarkan dalam Mukhtar Muhammadiyah ke 36 pada 9-15 Juli 1965 di Bandung. Ketika ketentuan SIT diganti dengan SIUPP (Surat Izin Usaha Perusahaan Pers), Suara Muhammadiyah juga memenuhinya dengan SK Menpen RI No-200/SK Menpen/SIUPP/D.2/1986, tertanggal 28 Juni 1986 (Afifi, 2005). Saat ini Majalah Suara Muhammadiyah konsisten terbit dwi mingguan dengan versi digital dan cetak, dikelola oleh kader-kader muda Muhammadiyah yang tergabung dalam PT Syarikat Cahaya Media (amal usaha milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan menjadi corong utama Persyarikatan Muhammadiyah.

NU Online merupakan media resmi organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) yang dirintis sejak tahun 2002. NU Online dengan alamat situs www.nu.or.id. Ini menjadi pelantang NU dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan NU, sekaligus juga sebagai media informasi dan komunikasi internal PBNU dengan warga NU (*Nahdliyyin*). Secara kultural NU Online banyak membawakan pemikiran-pemikiran NU (*fikrah nahdliyah*) yang moderat mewarisi pemikiran Gus Dur, dan mengintrodusir kembali pemikiran-pemikiran Gus Dur dalam konteks kekinian. Secara struktural NU Online berada di bawah Lembaga *Ta'lif wan-Nasyr* Nahdlatul Ulama (LTNNU), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham *Ahlussunnah wal Jamaah*.

NU Online lahir tahun 2002 digagas oleh KH. Ahmad Hasyim Muzadi, Masduki Baidlawi, Taufik R Abdullah, Saiful Bahri Anshori dan Mu'im DZ. Pada tahun 2005 situs ini mendapatkan penghargaan sebagai situs Indonesia terbaik dari Majalah Komputer Aktif Kategori Sosial dan Kemasyarakatan.

¹ Tentang Suara Muhammadiyah | Suara Muhammadiyah, diakses pada 21/6/2021: 22.00.

Secara lebih makro, NU Online menjadi representasi NU sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia baik dalam skala nasional dan global. Media ini merupakan alat pelebagaan kultur keislaman NU, terutama kultur moderasi Islam dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan beragama. Sejak tahun 2006, NU Online menurunkan tulisan dalam tiga bahasa: Indonesia, Arab, dan Inggris. NU Online ini kemudian menjadi sarana penyebaran informasi paling efektif berkenaan dengan berita-berita perkembangan NU ke seluruh dunia (Sefriyono, 2020).

Berkaitan dengan peran NU Online sebagai media resmi NU dalam memberikan pemahaman mengenai isu-isu radikalisme seperti jihad, dan toleransi terhadap non-muslim kepada kalangan warga NU adalah dengan mereproduksi argumen-argumen yang pernah dikemukakan oleh para pendahulu NU. Mengajukan juga argumen-argumen baru sesuai zaman, misalnya kenapa tidak perlu khilafah Islamiyah hari ini? Karena memang Islam tidak memandatkan sistem negara yang baku. Sistem negara itu bagian dari urusan bersama yang bisa dipecahkan lewat jalur musyawarah (Romadlan et al., 2020).

b. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, kontra-diskursus radikalisme difokuskan pada dua isu utama gerakan radikalisme, yakni dasar negara dan jihad. Berkaitan dengan kedua isu tersebut, maka berikut ditampilkan isi-isi dari media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online yang dapat dikategorikan sebagai kontra-diskursus radikalisme dalam isu dasar negara dan jihad.

Tabel 1. Isi suaramuhammadiyah.id dan NU Online
sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Dasar Negara

No	Suaramuhammadiyah.id		NU Online	
	Edisi	Judul	Edisi	Judul
1	26/10/2019	Muhammadiyah Berpaham Negara Pancasila Darul Ahdi Was-	06/09/2020	Paham Khilafah Potensial Lahirkan Konflik bagi Keutuhan Bangsa (nu.or.id)

		Syahadah Suara Muhammadiyah		
2	16/06/2016	Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah Suara Muhammadiyah	03/09/2020	Ideologi Khilafah Bertentangan dengan Semangat Persatuan di Indonesia (nu.or.id)
3	21/03/2020	Masih Perlu Road Map Mengisi Negara Pancasila Suara Muhammadiyah	29/08/2020	Kontra Gagasan dan Keterlibatan Tokoh Agama Penting Halau Paham Khilafah (nu.or.id)
4	01/06/2020	Tausiyah Kebangsaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pancasila Suara Muhammadiyah	23/08/2020	Muslim yang Baik Otomatis Pancasila-lais (nu.or.id)
5	03/12/2017	Posisi Muhammadiyah Dan Pancasila Sebagai Konsensus Nasional Suara Muhammadiyah	17/08/2020	Gus Nadir: NU Konsisten dengan Asas Tunggal
6	15/06/2017	Haedar Nashir: Bagi Muhammadiyah Indonesia Dan Pancasila Itu 'Belum Final' Suara Muhammadiyah	31/07/2020	Kontra Narasi atas Ideologi Khilafah Tetap Diperlukan, Tapi... (nu.or.id)
7	09/07/2018	Sekretaris PP Muhammadiyah: Pancasila Sebagai Tafsir Kontekstual Dari Nilai Al-Qur'an Dan Sunnah Suara Muhammadiyah	05/07/2020	'Pancasila Tak Akan Di-Agama-kan, Agama Tak Akan Di-Pancasila-kan' (nu.or.id)
8	18/06/2016	Dar Al-Ahdi Wa As-Syahadah: Konsep Negara Yang Ideal Suara Muhammadiyah	28/06/2020	Meneguhkan Pancasila sebagai Dasar Bernegara (nu.or.id)
9	04/03/2020	Soal Pembubaran HTI, Haedar Nashir: NKRI Darul Ahdi Wa Syahadah Suara Muhammadiyah	24/06/2020	Islam, Pancasila, dan Harmonisasi Kehidupan Berbangsa (nu.or.id)
10	28/07/2017		01/06/2020	Menyimak Kembali Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam (nu.or.id)
11			21/05/2020	Meneguhkan Pancasila Sebagai Konsensus Berbangsa (nu.or.id)

12			26/02/2020	Islam Wasathiyah Kunci Selaraskan Nilai Agama dan Pancasila (nu.or.id)
13			13/02/2020	GP Ansor Tegaskan Jangan Benturkan Agama dengan Pancasila (nu.or.id)
14			08/12/2019	Ketua NU Batu: Khilafah dan Pancasila Tidak Dapat Disandingkan
15			19/09/2019	Gus Dur dan Peneguhan Negara Bangsa (nu.or.id)
16			25/06/2019	KH Ma'ruf Amin Sebut Indonesia adalah Darul Mitsaq (nu.or.id)
17			08/04/2019	PBNU Komitmen Jaga Pancasila dan NKRI Sampai Kapanpun
18			16/02/2019	Kiai Masdar Tegaskan Pancasila Sangat Islami (nu.or.id)
19			01/11/2018	Bersama NU, Muhammadiyah Tegaskan Menolak Paham Khilafah
20			27/04/2018	Grand Syekh Al-Azhar Sebut Nilai-nilai Pancasila Sejalan dengan Ajaran Islam (nu.or.id)
21			20/01/2018	Yudi Latif: Prinsip Keadilan Pancasila dan Islam itu Sama (nu.or.id)
22			01/06/2017	10 Menit Gus Dur Putuskan Pancasila itu Islami dan Final (nu.or.id)
23			19/05/2017	Pancasila itu Islami, Qura'ni, dan Rabbani (nu.or.id)
24			22/01/2017	Yakinlah, Pancasila Tak Bertentangan dengan Islam (nu.or.id)

Tabel 2. Isi suaramuhammadiyah.id dan NU Online
sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Jihad.

No	Suaramuhammadiyah.id		NU Online	
	Edisi	Judul	Edisi	Judul
1	10/12/2020	Okky Madasari: Sastra Sebagai Jihad Anti Korupsi Suara Muhammadiyah	26/10/2020	Tugas Santri Gelorakan Ruhul Jihad untuk Menjawab Tantangan Zaman (nu.or.id)
2	20/11/2020	Jihad Ekonomi PWPM Sumut Lewat Warung Al-Ma'un Suara Muhammadiyah	24/10/2020	Di Tengah Pandemi, Pesantren Harus Jadi Pionir 'Jihad Ekonomi' (nu.or.id)
3	07/11/2020	'Aisyiyah Terus Tingkatkan Jihad Masa Pandemi Covid-19 Suara Muhammadiyah	17/09/2020	NU Banyumas: Bertani adalah Jihad
4	16/07/2020	Jihad Pergerakan Muhammadiyah Suara Muhammadiyah	21/03/2020	Jihad Melawan Corona, NU Jakpus Semprotkan Disinfektan ke Rumah Ibadah
5	02/06/2020	Jihad Konstitusi Di Tengah Pandemi Suara Muhammadiyah	14/11/2019	Soal Ekstremisme dan Salah Paham Memaknai Jihad (nu.or.id)
6	07/05/2020	Ramadhan Dan Jihad Kolektif Melawan Covid-19 Suara Muhammadiyah	11/11/2019	Teladani Jihad Pahlawan, 300 Santri Siap Berjihad di Medsos (nu.or.id)
7	05/05/2020	Haedar Nashir: Membantu Dhuafa Melawan Wabah Corona Jihad Fisabilillah Suara Muhammadiyah	11/11/2019	Sambut Seruan NU Jatim, LDNU Jombang Gencarkan Jihad Medsos
8	17/12/2019	Muhammadiyah Dan Jihad Kearsipan Suara Muhammadiyah	24/10/2019	Sekjen PBNU: Jihad Santri Hari Ini Perangi Kemiskinan dan Kebodohan
9	06/03/2019	Jihad Konstitusi Muhammadiyah Dilanjutkan Suara Muhammadiyah	14/10/2019	Tak Cukup Kuasai Pengetahuan Agama, Santri Perlu Jihad di Medsos (nu.or.id)
10	26/12/2018	Prof Zainuddin Maliki: Jihad Politik Salah Satunya Untuk Perbaiki Sulaman Negeri Suara Muhammadiyah	26/08/2019	Jihad Zaman Now Juga Merambah Dunia Maya (nu.or.id)
11	29/09/2018	Launching 'Taman Pustaka 38', IMM Makassar Timur Gelorakan Jihad Literasi Suara Muhammadiyah	24/08/2019	Jihad saat Ini Perangi Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan (nu.or.id)

12	21/09/2018	Berantas TB Bagi Kader 'Aisyiyah Adalah Jihad Sosial Suara Muhammadiyah	26/06/2019	Mengurangi Limbah Plastik, Jihad yang Butuh Dukungan Semua Pihak (nu.or.id)
13	20/09/2018	Jihad Kemanusiaan Muhammadiyah Depok Suara Muhammadiyah	25/06/2019	Ketua NU Jateng: Nasionalisme dan Patriotisme adalah Jihad Aswaja
14	17/04/2018	Jihad Intelektual Di Era Millenial Suara Muhammadiyah	24/04/2019	Ingin Jihad? Ketua PBNU: Mari Lawan Korupsi
15	20/01/2018	Ketum PP Aisyiyah: Jihad Ekonomi Jadi Agenda Strategis Aisyiyah Makmurkan Bangsa Suara Muhammadiyah	02/04/2019	PBNU: Bertani Termasuk Jihad untuk Kurangi Persoalan Pangan
16	28/08/2017	Muhammadiyah Dan 'Aisyiyah Provinsi Riau Lakukan Jihad Sosial Lawan Tuberculosis Suara Muhammadiyah	13/03/2019	Ke Suriah atas Nama Jihad? Syekh Taufiq Al-Buthi: Mereka Tidak Mengerti Islam (nu.or.id)
17	02/07/2017	Haedar Nashir: Bergerak Dari Jihad Lil-Muaradhah Ke Jihad Lil-Muwajahah Suara Muhammadiyah	06/01/2019	KH Yusuf Chudlori: Jihad Tidak Selalu Bermakna Perang (nu.or.id)
18	10/02/2017	Ketua Komisi Yudisial: Jihad Konstitusi Sebagai Jalan Muhammadiyah Mewujudkan Keadilan Sosial Suara Muhammadiyah	06/12/2019	Warga Lakardowo Jihad Melawan Limbah PT. PRIA (nu.or.id)
19	30/12/2016	Ingin Indonesia Berdaulat, MPM Gelorakan Jihad Kedaulatan Pangan Suara Muhammadiyah	24/10/2018	Resolusi Jihad Zaman Now (nu.or.id)
20	04/02/2016	Jihad Ekonomi PWM Jawa Timur Suara Muhammadiyah	24/10/2018	Makna Resolusi Jihad Bukan Lagi dengan Angkat Senjata (nu.or.id)
21	12/01/2016	SATGAS Muda Siapkan Motivator Jihad Anti Korupsi Suara Muhammadiyah	06/10/2018	Bersama Pergunu, Santri Al-Karimiyah Depok Galakkan Jihad Pena
22	06/05/2016	Memahami Perang Atas Nama Jihad Suara Muhammadiyah	29/06/2018	Kumpulkan Kiai dan Nyai, PSP Perkuat Jihad Lawan Radikalisme Berbasis Medsos (nu.or.id)

23	25/02/2019	Jihad Perang Dan Jihad Damai Suara Muhammadiyah	11/06/2018	Ketua Ansor Jateng: Pemudik adalah Jihad fi Sabilillah (nu.or.id)
24	26/08/2016	Prof Muhadjir Effendy: Jihadis Memang Doktrin Islam Suara Muhammadiyah	24/05/2018	Trilogi Jihad Zaman Now (nu.or.id)
25			17/05/2018	Makna Jihad yang Sebenarnya (nu.or.id)
26			28/03/2018	Rijalul Ansor Jakarta Timur Siap Jihad Lawan Hoaks (nu.or.id)
27			22/03/2018	Jihad Lawan Hoaks, Ketua PCNU Pringsewu Ajak 'Klik' NU Online
28			12/03/2018	Jihad Ekonomi NU Zaman Now
29			05/12/2017	Jihad Literasi Punya Peran Penting Tangkal Radikalisme Agama (nu.or.id)
30			23/10/2017	Kiai Said Jelaskan Empat Macam Jihad (nu.or.id)
31			05/09/2017	Ansor Surabaya Kumandangkan Jihad Lawan Narkoba (nu.or.id)
32			24/07/2017	Fatayat NU Ajak Tokoh Lintas Agama dan Kepercayaan Jihad Sosial
33			17/01/2017	Jihad Membendung Hoax yang Meresahkan (nu.or.id)
34			23/12/2016	LPOI Deklarasikan Jihad Lawan Narkoba (nu.or.id)
35			28/11/2016	Gandeng KPK, Lakpesdam Banten Bedah "Jihad NU Melawan Korupsi"
36			18/08/2016	Gus Tutut: Jaga Perbatasan Bagian dari Jihad (nu.or.id)
37			24/06/2016	Alissa: Korupsi Harus Dilawan dengan Jihad (nu.or.id)
38			21/01/2016	Jihad Itu di Bidang Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan, Bukan Ngebom! (nu.or.id)

Selanjutnya isi-isi kedua media online di atas dianalisis dengan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengungkapkan bentuk-bentuk kontra-diskursus radikalisme. Dalam hasil penelitian ini akan mendeskripsikan tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Fairclough, yaitu: analisis teks (*critical linguistic*), analisis produksi wacana, yang meliputi produksi teks dan konsumsi teks, dan analisis konteks yang mencakup praktik sosiokultural.

1) Analisis Teks

Dalam analisis teks pada Analisis Wacana Kritis Fairclough terdapat tiga elemen yang secara kritis dianalisis, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Dalam konteks ini representasi adalah bagaimana peristiwa, orang-orang, kelompok, gagasan ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Sedangkan relasi adalah bagaimana hubungan antarpartisipan, yakni pembuat teks (wartawan atau redaktur), khalayak pembaca, dan partisipan publik (politisi, tokoh, ulama, dan sebagainya) ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Adapun identitas adalah bagaimana identitas partisipan, yakni pembuat teks (wartawan atau redaktur), khalayak pembaca, dan partisipan publik (politisi, tokoh, ulama, dan sebagainya) ditampilkan dan digambarkan dalam teks, termasuk bagaimana pembuat teks mengidentifikasikan dirinya dalam wacana yang ditampilkan (Eriyanto, 2001; Fairclough, 1995).

a) Representasi Kontra-Diskursus Radikalisme pada Isu Dasar Negara Pancasila

Representasi dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana gagasan atau ide mengenai kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara Pancasila ditampilkan dan digambarkan dalam isi media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Pada konteks ini, kontra-diskursus adalah semacam perlawanan dengan memproduksi diskursus tandingan. Bila diskursus merujuk pada dunia yang digambarkan, yang diungkapkan, dan yang diinterpretasikan (Ricoeur, 2006), maka begitu juga dengan kontra-diskursus. Tetapi dalam kontra-diskursus apa yang digambarkan dan diinterpretasikan berbeda, tepatnya berlawanan dengan apa yang digambarkan dan diinterpretasikan dalam diskursus.

Berdasarkan analisis teks (*critical linguistic*) pada isi-isi media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online, representasi kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara Pancasila yang ditampilkan dan digambarkan oleh kedua media online tersebut adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, representasi kontra-diskursus radikalisme yang dimunculkan oleh kedua media online resmi organisasi Islam Muhammadiyah dan NU ini merupakan perlawanan, tandingan, atau kontestasi atas diskursus Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) yang digagas oleh utamanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok-kelompok muslim radikal lainnya.

Representasi suaramuhammadiyah.id. Sebagai media resmi organisasi Islam Muhammadiyah yang moderat, suaramuhammadiyah.id menampilkan gagasan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* (Negara Kesepakatan dan Kesaksian) sebagai kontra-diskursus radikalisme atas diskursus Negara Islam. Artikel-artikel suaramuhammadiyah.id yang merepresentasikan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* ditampilkan dan digambarkan oleh suaramuhammadiyah.id di antaranya pada artikel yang berjudul “*Muhammadiyah Berpaham Negara Pancasila Darul Ahdi Was-*” (26/10/2019), “*Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*” (16/06/2016), “*Dar Al-Ahdi Wa As-Syahadah: Konsep Negara Yang Ideal*” (18/06/2016), “*Soal Pembubaran HTI, Haedar Nashir: NKRI Darul Ahdi Wa Syahadah*” (04/03/2020), dan “*Posisi Muhammadiyah Dan Pancasila Sebagai Konsensus Nasional*” (03/12/2017).

Representasi Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* sebagai kontra-diskursus Negara Islam ini misalnya ditampilkan dan digambarkan artikel suaramuhammadiyah.id yang berjudul “*Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*” (16/06/2016). Dalam artikel ini dituliskan, “*Meskipun tidak ditemukan bentuk negara Pancasila dalam al-Quran, namun sampai saat*

ini juga belum ditemukan sistem pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, sebagian dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Qurani telah diaplikasikan dalam negara Pancasila. Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai titik temu seluruh komponen bangsa". Pada bagian lain artikel tersebut juga menegaskan bahwa, "Muhammadiyah berada di posisi tengah, menjaga dan mengawal supaya negara tidak cenderung ke salah satu kutub ekstrim, baik konservatif yang menginginkan negara Islam, maupun negara liberal-sekuler".

Suaramuhammadiyah.id juga merepresentasikan gagasan bahwa Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* merupakan konsep negara yang ideal. Dalam artikel yang berjudul "*Dar Al-Ahdi Wa As-Syahadah: Konsep Negara Yang Ideal*" (04/03/2020), suaramuhammadiyah.id menggambarkan sebagai berikut: "*Gerakan ini bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam yang bersifat internasional dengan dalih bahwa Indonesia mengalami kekacauan sistem dan dililit banyak permasalahan, tidak sejalan dengan aspirasi Islam dan umat Islam sehingga perlu ada alternatif. Mereka melihat alternatif satu-satunya adalah negara Islam dalam bentuk khilafah Islamiyah dan bersifat Internasional*". Mengutip pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, suaramuhammadiyah pada artikel tersebut menuliskan, "*bersamaan dengan gerakan tersebut muncul juga gerakan transnasional yang menganut paham islamisme, yang memandang Islam sebagai idiologi politik. "Berdasarkan pengamatan terhadap gerakan tersebut, maka Muhammadiyah merumuskan konsep 'Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah' untuk menyegel dan mengunci pemikiran yang diaktualisasikan dalam gerakan dan usaha-usaha mendirikan negara di luar konsep dasar negara yang telah kita sepakati Bersama*".

Representasi NU Online. Sebagai media online resmi organisasi Islam NU yang juga berhaluan moderat, NU Online merepresentasikan gagasan bahwa Pancasila itu islami, dan Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, sebagai bentuk kontra-diskursus Negara Islam. Dengan kata

lain, dikarenakan Pancasila itu sudah islami dan tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, maka Negara Islam atau Khilafah Islamiyah tidak relevan dan tidak dibutuhkan lagi di Indonesia. Apalagi menurut NU Online dalam representasinya memandang bahwa ideologi khilafah berpotensi memecah persatuan Bangsa Indonesia.

NU Online dalam merepresentasikan kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara memang banyak menampilkan dan menggambarkan bahwa Pancasila itu islami, dan tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Pemberitaan-pemberitaan dan artikel-artikel NU Online yang merepresentasikan keselarasan Islam dengan Pancasila ditampilkan pada judul-judul berita dan artikel di antaranya pada judul *“Kiai Masdar Tegaskan Pancasila Sangat Islami”* (16/02/2019), *“Grand Syekh Al-Azhar Sebut Nilai-nilai Pancasila Sejalan dengan Ajaran Islam”* (27/04/2018), *“Yudi Latif: Prinsip Keadilan Pancasila dan Islam itu Sama”* (20/01/2018), *“10 Menit Gus Dur Putuskan Pancasila itu Islami dan Final”* (01/06/2017), *“Pancasila itu Islami, Qur’ani, dan Rabbani”* (19/05/2017), dan *“Yakinlah, Pancasila Tak Bertentangan dengan Islam”* (22/01/2017).

Pancasila itu islami dan tidak ada pertentangan antara Islam dengan Pancasila sebagai kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara ditampilkan dan digambarkan oleh NU Online di antaranya dalam berita yang berjudul *“Bersama NU, Muhammadiyah Tegaskan Menolak Paham Khilafah”* (01/11/2018), dalam isi berita tersebut ditampilkan bahwa *“pertemuan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Rabu (31/10) malam menyita perhatian publik mengingat situasi bangsa terkini. Selain menyikapi sejumlah problem bangsa, pertemuan tersebut juga sepakat meneguhkan Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami”*. Pada bagian lainnya juga disebutkan, *“Kiai Said mengungkapkan ada rencana dari pihak tertentu untuk menerapkan khilafah di wilayah Asia Tenggara. Ia menyatakan perlu komitmen bersama agar rencana tersebut tidak terjadi.*

Bahkan saya baca kalau tidak salah ada rencana tahun 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan mimpi itu (pendirian khilafah, red) tidak terjadi, tidak akan terlaksana berkat adanya NU dan Muhammadiyah”.

Representasi Pancasila itu islami dan tidak ada pertentangan antara Islam dengan Pancasila sebagai kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara ditampilkan dan digambarkan juga oleh NU Online dalam berita yang berjudul “Yakinlah, Pancasila Tak Bertentangan dengan Islam” (22/01/2017). Dalam berita tersebut dituliskan, “gerakan anti-Pancasila sedang merebak. Para “juru kampanye”nya dengan terus terang menyatakan penolakannya. Bagi mereka, Pancasila adalah thogut dan umat Islam wajib mengingkari thogut itu. Hal tersebut disampaikan Wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) KH Abdul Moqsith Ghazali pada akun Facebooknya, Jumat (20/1). Namun, lanjutnya, gerakan ini tak banyak mendapatkan simpati publik. Penolakan terhadap mereka terjadi di mana-mana. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi arus utama terus melakukan pembelaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Menurutny, pernyataan Kiai As'ad dan Kiai Achmad Siddiq puluhan tahun lalu itu kian relevan di tengah kegamangan politik ideologis yang menimpa sebagian umat Islam Indonesia sekarang. Maka, yakinlah! wahai umat Islam bahwa Pancasila tak bertentangan dengan Islam”.

b) Relasi dalam Kontra-Diskursus Radikalisme pada Isu Dasar Negara Pancasila

Relasi berkaitan dengan hubungan antarpartisipan, yakni pembuat teks (wartawan atau redaktur), khalayak pembaca, dan partisipan publik (politisi, tokoh, ulama, dan sebagainya) ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Analisis relasi ini bertujuan untuk memahami konstruksi realitas media yang terbentuk berdasarkan kontestasi kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, partisipan atau pihak-

pihak yang berelasi dalam teks adalah (1) wartawan/redaktur suaramuhammadiyah.id dan NU Online, (2) pembaca/warga Muhammadiyah dan NU, dan (3) kelompok-kelompok muslim radikal.

Relasi suaramuhammadiyah.id. sebagai media online resmi dari Muhammadiyah, suaramuhammadiyah.id menjadi corong yang melantangkan sikap, pandangan, dan pemikiran-pemikiran kemuhammadiyah mengenai segala macam aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan keindonesiaan dan keislaman. Dalam konteks relasi kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara Pancasila, posisi suaramuhammadiyah.id adalah sebagai alat kekuatan organisasi Muhammadiyah dalam melawan atau menandingi diskursus pembentukan Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) di Indonesia. Maka dari itu, isi suaramuhammadiyah.id mengenai isu dasar negara, baik dalam bentuk berita, opini, artikel, dan lain-lainnya selalu mencerminkan pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat. Bahwa *“Muhammadiyah Berpaham Negara Pancasila Darul Ahdi Wa-Syahadah”* 26/10/2019, *“Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah”* (16/06/2016), *“Posisi Muhammadiyah Dan Pancasila Sebagai Konsensus Nasional”* (13/12/2017), *“Sekretaris PP Muhammadiyah: Pancasila Sebagai Tafsir Kontekstual Dari Nilai Al-Qur'an Dan Sunnah”* (09/07/2018), dan *“Soal Pembubaran HTI, Haedar Nashir: NKRI Darul Ahdi Wa Syahadah”* (04/03/2020).

Partisipan kedua dalam relasi pembuatan teks mengenai kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara adalah pembaca (pengakses) suaramuhammadiyah.id yang sebagian besar dari mereka adalah warga Muhammadiyah (*segmented*). Relasi suaramuhammadiyah.id dengan pembacanya (warga Muhammadiyah) lebih bersifat simetris, relatif tidak ada perbedaan atau pertentangan pandangan dalam banyak hal, termasuk mengenai gagasan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* sebagai bentuk kontra-diskursus Negara Islam atau *Khilafah Islamiyah*.

Pembaca suaramuhammadiyah.id sebagai khalayak pada umumnya menerima gagasan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id.

Relasi antara suaramuhammadiyah.id dan pembacanya yang simetris dan menerima dalam pemberitaan mengenai kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara, dan menentang gagasan Negara Islam, misalnya terlihat pada artikel yang berjudul “*Muhammadiyah Berpaham Negara Pancasila Darul Ahdi Was-Syahadah*” (26/10/2019). Dalam berita tersebut dituliskan, “*Muhammadiyah termasuk para warganya, tidak bersetuju dan tidak memberi ruang untuk adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Ideologi atau pandangan tentang negara khilafah sebagaimana halnya untuk negara komunis, negara sekuler, dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip Negara Pancasila Darul Ahdi Was-Syahadah tertolak di dalam Muhammadiyah*”. Pada berita lainnya yang berjudul “*Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*” (16/06/2016), juga disebutkan, “*salah satu keputusan penting Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada 3-7 Agustus 2015 adalah tawaran konsep Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah. Pemikiran kolektif Muhammadiyah tentang Negara Pancasila ini bersifat mengikat dan menjadi keputusan resmi yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh kader, anggota, dan warga Persyarikatan Muhammadiyah*”.

Pihak ketiga dalam relasi kontra-diskursus radikalisme dalam isu dasar negara adalah kelompok-kelompok muslim radikal yang hendak mengganti dasar negara Pancasila dengan Negara Islam. Kelompok-kelompok ini dalam relasinya dengan suaramuhammadiyah.id adalah sebagai pihak lain yang menjadi sasaran kontra-diskursus radikalisme. Gagasan mengenai Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* yang direpresentasikan dalam isi suaramuhammadiyah.id pada dasarnya

ditujukan kepada kelompok-kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam ini. Sedangkan relasi warga Muhammadiyah sebagai pembaca suaramuhammadiyah.id dengan kelompok-kelompok muslim radikal ini tentu saja bersifat asimetris atau bertentangan karena keduanya memiliki pandangan dan sikap yang berbeda mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam suaramuhammadiyah.id relasi keduanya digambarkan warga Muhammadiyah sebagai pihak yang ingin menjaga dan mempertahankan Pancasila, sedangkan kelompok muslim radikal ini diposisikan sebagai pihak yang ingin mengganti dan mengubah Pancasila dengan Syariat Islam.

Relasi antara redaktur suaramuhammadiyah.id, warga Muhammadiyah sebagai pembaca, dan kelompok muslim radikal sebagai partisipan dalam kontra-diskursus radikalisme di suaramuhammadiyah.id dapat dilihat pada judul berita “Masih Perlu Road Map Mengisi Negara Pancasila” (21/03/2020). Dalam artikel tersebut dituliskan, *“adanya kelompok-kelompok atau beberpa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari gerakan gerakan yang secara terbuka melakukan kampanye untuk melemahkan Pancasila atau bahkan melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Pada berita lain yang berjudul “Soal Pembubaran HTI, Haedar Nashir: NKRI Darul Ahdi Wa Syahadah” (04/03/2020), dituliskan *“Oleh karena negara Pancasila sebagai konsensus, kata Haedar, maka setiap warga, organisasi, dan komponen bangsa harus bersetuju dan menerima Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI dan menjunjung tinggi kebhinekaan. Tentu tidak boleh ada kelompok dan gerakan yang bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang didirikan tahun 1945 itu, katanya. Menurut Haedar, setiap perhimpunan, organisasi, dan kelompok di tubuh bangsa ini tidak boleh ada yang berideologi dan bertujuan membentuk sistem kenegaraan yang*

bertentangan dengan Negara Pancasila sebagaimana didirikan tahun 1945”.

Relasi NU Online. Sebagai media online resmi dari organisasi Islam NU, NU Online berfungsi sebagai pembawa suara PBNU dalam percaturan kebangsaan dan keislaman, sekaligus menjadi rujukan warga NU (*Nahdliyin*) dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang, baik secara internal maupun eksternal NU. Dalam konteks relasi kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara Pancasila, posisi NU Online tentu saja sebagai alat kekuasaan PBNU untuk melawan dan menandingi diskursus Negara Islam yang diwacanakan oleh kelompok-kelompok muslim radikal. Meskipun secara umum fungsi dan peran NU Online tidak semata-mata sebagai kontra-diskursus radikalisme, tapi lebih kepada penyebaran pemikiran-pemikiran ke-NU-an (Aswaja), namun banyak isi-isi NU Online baik dalam bentuk berita, artikel, opini, dan lainnya sebagainya berkaitan dengan upaya kontra-diskursus radikalisme. Dalam konteks ini NU Online membawa misi organisasi NU sebagai organisasi Islam moderat yang menolak Negara Islam.

Isi-isi NU Online yang menunjukkan relasinya dengan PBNU dalam merepresentasikan Pancasila itu islami dan tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila sebagai kontra-diskursus Negara Islam, ditampilkan dan digambarkan oleh NU Online dalam isi-isinya. Relasi itu misalnya dapat dilihat pada judul-judul di antaranya sebagai berikut. “*Kontra Gagasan dan Keterlibatan Tokoh Agama Penting Halau Paham Khilafah*” (29/08/2020), “*Ketua NU Batu: Khilafah dan Pancasila Tidak Dapat Disandingkan*” (08/12/2019), “*KH Ma’ruf Amin Sebut Indonesia adalah Darul Mitsaq*” (25/06/2019), “*PBNU Komitmen Jaga Pancasila dan NKRI Sampai Kapanpun*” (08/04/2019), “*Bersama NU, Muhammadiyah Tegaskan Menolak Paham Khilafah*” (01/11/2018), dan “*10 Menit Gus Dur Putuskan Pancasila itu Islami dan Final*” (01/06/2017).

Relasi yang kedua dalam kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara adalah antara NU Online dengan warga NU (*Nahdliyin*) sebagai khalayak pembacanya. Dalam relasi antara keduanya, lebih bersifat timbal balik dan menguatkan. Di posisi yang satu, NU Online berfungsi sebagai media resmi PBNU yang menyebarkan pemikiran ke-NU-an (*fikrah Nahdliyah*) dan faham *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja), mengenai segala macam persoalan, termasuk mengenai penolakan gagasan Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) di Indonesia kepada *Nahdliyin*. Pada posisi yang lain, *Nahdliyin* sebagai khalayak pembaca (pengakses) NU Online juga membutuhkan informasi-informasi yang bisa dipercaya (*shahih*) mengenai berbagai macam persoalan kebangsaan dan keislaman, termasuk masalah radikalisme beragama yang menguat beberapa dekade terakhir.

Relasi antara NU Online dengan *Nahdliyin* sebagai pembacanya berkaitan dengan kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara, di mana NU Online merepresentasikan Pancasila sebagai dasar negara yang islami, dan tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, ditampilkan dan digambarkan oleh NU Online dalam judul-judul di antaranya berikut ini. “*Kiai Maman: Warga NU Harus Pertahankan Pancasila*” (15/12/2019), yang isinya “*Dalam kesempatan ini, saya sampaikan pentingnya warga NU mempertahankan Pancasila. Karena perjalanan Pancasila sejak lahir sampai hari ini tidak bisa lepas dari peran penting NU dan tokohnya,*” ujar *Kiai Maman di hadapan ratusan pengurus Muslimat NU se-Kabupaten Subang*”. Dalam berita lain yang berjudul “*10 Menit Gus Dur Putuskan Pancasila itu Islami dan Final*” (01/06/2017), juga ditunjukkan relasi antara NU Online dengan *Nahdliyin* dalam konteks kontra-diskursus radikalisme. “*Gus Dur membuka rapat dengan bertanya kepada anggotanya satu per satu soal pendapatnya tentang hubungan Islam dan Pancasila. Mereka menyampaikan pandangannya terhadap satu per satu sila dalam Pancasila disertai sejumlah argumen keagamanya. Gus Dur*

mendengarkan dan menyimak dengan penuh perhatian. Pada dasarnya, Pancasila menurut para kiai dalam subkomisi ini tidak bertentangan dengan Islam, justru sebaliknya sejalan dengan nilai-nilai Islam. “Pancasila itu Islami,” simpul mereka seperti diungkapkan Gus Mus”.

Relasi berikutnya berkaitan dengan relasi antara NU Online dengan partisipan publik atau pihak ketiga dalam relasi sebuah pemberitaan media, yaitu kelompok-kelompok muslim radikal dan islamis yang bercita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia. Dalam relasinya, NU Online memposisikan kelompok-kelompok muslim radikal ini sebagai kelompok berseberangan yang memiliki kekuatan yang mesti dilawan. Maka dari itu, dalam isi-isinya NU Online banyak menampilkan kelompok ini sebagai ancaman persatuan bangsa karena diskursus Negara Islam yang terus mereka wacanakan. Sebagai upaya melawannya, NU Online kemudian banyak menampilkan juga gagasan Pancasila itu islami dan keduanya tidak saling bertentangan sebagai kontra-diskursus Negara Islam.

Relasi NU Online sebagai media resmi NU dengan kelompok-kelompok muslim radikal yang berlawanan, ditampilkan dan digambarkan oleh NU Online dalam berita-berita dan artikel-artikelnya berikut. Pada judul *“Ideologi Khilafah Bertentangan dengan Semangat Persatuan di Indonesia”* (03/09/2020), dinyatakan bahwa, *“Indonesia pada dasarnya telah menerapkan nilai-nilai Islam sebagai spirit hidup bernegara, di mana semua warga negara Muslim dapat menjalankan keyakinan tauhidnya. Dikatakan, prinsip tauhid itu juga dapat dilaksanakan di dalam praktek hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi dengan alasan itu, mendorong lahirnya negara berbasis khilafah. Menurutny, ideologi khilafah di Indonesia dapat menimbulkan perpecahan dan disintegrasi hukum”.*

Relasi yang bertentangan antara NU Online dengan kelompok-kelompok muslim radikal dalam isu dasar negara Pancasila juga ditunjukkan dan ditampilkan oleh NU Online dalam berita yang berjudul *“Paham Khilafah Potensial Lahirkan Konflik bagi Keutuhan Bangsa”* (06/09/2020), yang menyatakan *“bahwa NKRI dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa. Itu merupakan hasil ijtihad ulama dan menjadi kesepakatan tokoh pendiri bangsa serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Upaya memaksakan paham khilafah untuk diterapkan di Indonesia merupakan bagian dari pengingkaran terhadap kesepakatan bangsa yang sudah lama menerima NKRI dan Pancasila. Upaya tersebut dapat berpotensi melahirkan konflik dan ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara”*.

c) Identitas dalam Kontra-Diskursus Radikalisme pada Isu Dasar Negara Pancasila

Identitas dalam analisis teks ini berkaitan dengan identitas partisipan, yakni pembuat teks (wartawan atau redaktur), khalayak pembaca, dan partisipan publik (politisi, tokoh, ulama, dan sebagainya) ditampilkan dan digambarkan dalam teks, termasuk bagaimana pembuat teks mengidentifikasikan dirinya dalam wacana yang ditampilkan. Identitas yang digambarkan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online dalam teks masing-masing dalam konteks ini tentu saja berkaitan dengan kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara Pancasila. Identitas yang ditampilkan meliputi pihak-pihak yang saling berkaitan, yaitu (1) identitas pembuat teks (redaktur atau wartawan suaramuhammadiyah.id dan NU Online), (2) identitas khalayak pembaca suaramuhammadiyah.id dan NU Online, dan (3) identitas kelompok-kelompok muslim radikal.

Identitas suaramuhammadiyah.id. Muhammadiyah secara organisasi menyebut dirinya sebagai organisasi Islam Berkemajuan, organisasi Islam moderat, dan organisasi Islam dakwah amar makruf nahi

munkar. Dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara, suaramuhammadiyah.id menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi yang berpaham Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* (Negara Kesepakatan dan Kesaksian) sebagai identitas Muhammadiyah. Identitas tersebut ditampilkan oleh suaramuhammadiyah.id dalam dalam judul-judul pemberitaannya seperti “*Muhammadiyah Berpaham Negara Pancasila Darul Ahdi Was-Syahadah*” (26/10/2019), “*Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah*” (16/06/2016), dan “*Dar Al-Ahdi Wa As-Syahadah: Konsep Negara Yang Ideal*” (18/06/2016).

Identitas Muhammadiyah sebagai organisasi yang berpaham Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*, menegaskan penolakan Muhammadiyah terhadap upaya-upaya untuk mengganti Pancasila, baik dengan Negara Islam maupun dengan Negara Komunis. Dalam berita yang berjudul, “*Muhammadiyah Berpaham Negara Pancasila Darul Ahdi Was-Syahadah*” (26/10/2019), suaramuhammadiyah.id menuliskannya: “*Muhammadiyah termasuk para warganya, tidak bersetuju dan tidak memberi ruang untuk adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Ideologi atau pandangan tentang negara khilafah sebagaimana halnya untuk negara komunis, negara sekuler, dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip Negara Pancasila Darul Ahdi Was-Syahadah tertolak di dalam Muhammadiyah*”.

Suaramuhammadiyah.id dalam kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara tidak secara eksplisit menyebutkan identitasnya. Namun, posisi suaramuhammadiyah.id sebagai media resmi Persyarikatan Muhammadiyah maka identitas Muhammadiyah otomatis melekat juga pada suaramuhammadiyah.id. Kesamaan identitas suaramuhammadiyah.id dengan Muhammadiyah dapat dilihat dari wartawan dan redaksi suaramuhammadiyah.id yang juga merupakan

warga, anggota, dan pimpinan Muhammadiyah. Bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merupakan Pemimpin Redaksi suaramuhammadiyah.id yang turut menuliskan artikel-artikelnya di suaramuhammadiyah.id.

Begitu juga dengan identitas pembaca suaramuhammadiyah.id, tidak secara eksplisit dan langsung disebutkan oleh suaramuhammadiyah.id identitasnya seperti apa dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara. Meskipun demikian, identitas pembaca suaramuhammadiyah.id dapat diidentifikasi sebagian besar adalah warga Muhammadiyah, baik sebagai anggota maupun pimpinan, termasuk orang-orang yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti di bidang pendidikan, Kesehatan, sosial, dan sebagainya. Sebagai warga Muhammadiyah, pembaca suaramuhammadiyah.id, meski tidak ditampilkan secara eksplisit dalam konteks ini, identitasnya dapat diidentifikasikan sama seperti identitas Muhammadiyah sebagai organisasi, yakni mengikuti pandangan Muhammadiyah Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*.

Identitas suaramuhammadiyah.id dan pembaca suaramuhammadiyah.id dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara, yang secara implisit sama dengan identitas Muhammadiyah dapat dilihat pada berita, *“Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah”* (16/06/2016), yang isinya *“Salah satu keputusan penting Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada 3-7 Agustus 2015 adalah tawaran konsep Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah. Pemikiran kolektif Muhammadiyah tentang Negara Pancasila ini bersifat mengikat dan menjadi keputusan resmi yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh kader, anggota, dan warga Persyarikatan Muhammadiyah”*.

Berkaitan dengan identitas kelompok-kelompok muslim radikal yang mewacanakan pendirian Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*), suaramuhammadiyah.id menyebutnya dengan kelompok konservatif dan

gerakan transnasional yang berpaham islamisme sebagai identitasnya. Dalam pemberitaannya yang berjudul *“Muhammadiyah Posisikan Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah”* (16/06/2016), suaramuhammadiyah.id menuliskan, *“Muhammadiyah berada di posisi tengah, menjaga dan mengawal supaya negara tidak cenderung ke salah satu kutub ekstrim, baik konservatif yang menginginkan negara Islam, maupun negara liberal-sekuler. Haedar mengharapkan supaya segenap kekuatan Muhammadiyah membina kader dan kekuatan internal untuk pantas mengisi kebangsaan sebagai ‘dar al-ahdi wa al-syahadah’.* Sedangkan pada pemberitaan yang berjudul, *“Dar Al-Ahdi Wa As-Syahadah: Konsep Negara Yang Ideal”* (18/06/2016), suaramuhammadiyah.id juga menampilkan isi berikut, *“bersamaan dengan gerakan tersebut muncul juga gerakan transnasional yang menganut paham islamisme, yang memandang Islam sebagai idiologi politik. Berdasarkan pengamatan terhadap gerakan tersebut, maka Muhammadiyah merumuskan konsep ‘Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah’ untuk menyegel dan mengunci pemikiran yang diaktualisasikan dalam gerakan dan usaha-usaha mendirikan negara di luar konsep dasar negara yang telah kita sepakati bersama”.*

Identitas NU Online. Organisasi NU dikenal identitasnya sebagai organisasi Islam yang tradisional, dengan mengikuti faham *ahlussunnah wal jamaah* (Aswaja). Perkembangan mutakhir NU mengidentifikasikan organisasinya sebagai Islam Nusantara. Dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara, NU Online menyebut NU sebagai organisasi Islam *wasathiyah* (tengahan), dan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Identitas NU tersebut ditampilkan oleh NU Online dalam berita yang berjudul *“Islam Wasathiyah Kunci Selaraskan Nilai Agama dan Pancasila”* (26/02/2020), dan *“Bersama NU, Muhammadiyah Tegaskan Menolak Paham Khilafah”* (01/11/2018).

Identitas NU sebagai organisasi *wasathiyah* ditampilkan pada berita yang berjudul *“Islam Wasathiyah Kunci Selaraskan Nilai Agama dan*

Pancasila” (26/02/2020), di mana NU Online menuliskan, “nilai Islam yang washatiyah atau moderat disebutnya sebagai kunci yang mampu menyatukan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengamalkan nilai Islam Wasathiyah, maka tidak ada pertentangan secara substansial antara kedua nilai tersebut. Karena moderasi beragama itu melihat bagaimana Islam yang Wasathiyah. Tidak ekstrem kanan yang tekstualis, intoleran atau pun ekstrem kiri yang liberal. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Sehingga dalam kacamata NU, keduanya merupakan dua hal yang memiliki kedudukan berbeda dan tidak dapat dipertentangkan dan saling menggantikan satu dengan lainnya”.

Sedangkan identitas NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ditampilkan NU Online dalam beritanya yang berjudul *“Bersama NU, Muhammadiyah Tegaskan Menolak Paham Khilafah”* (01/11/2018). Dalam berita tersebut ditulis, *“Pertemuan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Rabu (31/10) malam menyita perhatian publik mengingat situasi bangsa terkini. Selain menyikapi sejumlah problem bangsa, pertemuan tersebut juga sepakat meneguhkan Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami”.*

Identitas NU Online dalam pemberitaannya mengenai kontra-diskursus radikalisme dalam isu dasar negara tidak secara jelas dan langsung menampilkan identitas wartawan dan redaktur dalam pemberitaannya. Meskipun demikian, sebagai media resmi NU yang berfungsi sebagai penyebar pemikiran-pemikiran ke-NU-an (*Fikrah Nahdliyah*), dan sumber informasi bagi Nahdliyin, NU Online memiliki identitas yang sama dengan NU secara umum, yakni media yang berpaham *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja). Paham Aswaja merupakan doktrin utama warga NU (*Nahdliyin*) yang memuat pandangan-pandangan di antaranya mengamalkan ajaran Islam dengan bermazdhab,

proporsional dalam menyikapi relasi agama dan negara, dan bersikap moderat dan toleran. Selain itu, wartawan dan redaktur NU Online sebagian besar merupakan santri-santri Ciganjur yang mewarisi pemikiran Gus Dur yang moderat dan toleran.

Begitupun dengan identitas pembacanya, NU Online tidak juga menyebutkan secara khusus apa identitas pembacanya dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isi dasar negara ini. Meskipun demikian, identitas pembaca NU Online dapat diidentifikasi sebagai warga NU (*Nahdliyin*) yang berpaham Aswaja juga. Sebagai penganut Aswaja, pembaca NU Online memiliki pandangan yang moderat berkaitan dengan relasi antara agama dan negara. Termasuk hubungan antara Islam dan Pancasila, yang memang sejak mula NU menerima Pancasila dan tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Selain itu sebagai *Nahdliyin*, pembaca NU Online juga menolak gagasan Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) yang hendak dijadikan pengganti Pancasila sebagai dasar negara oleh kelompok-kelompok muslim radikal.

Identitas NU Online dan pembaca NU Online yang sama-sama berpaham Aswaja dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara, tentu saja menolak gagasan Negara Islam atau *Khilafah Islamiyah* karena tidak sesuai dengan Aswaja. Di sisi lain, NU Online dan pembaca NU Online (*Nahdliyin*) berpandangan bahwa Pancasila dan NKRI sudah final, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila karena Pancasila itu islami. Pemberitaan-pemberitaan NU yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada judul-judul berikut. “*Bersama NU, Muhammadiyah Tegaskan Menolak Paham Khilafah*” (01/11/2018), “*Ideologi Khilafah Bertentangan dengan Semangat Persatuan di Indonesia*” (03/09/2020), “*Menyimak Kembali Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam*” (01/06/2020), “*Pancasila itu Islami, Qura’ni, dan Rabbani*” (19/05/2017), dan “*10 Menit Gus Dur Putuskan Pancasila itu Islami dan Final*” (01/06/2017).

Sedangkan berkaitan dengan identitas kelompok-kelompok muslim radikal yang mewacanakan gagasan Negara Islam di Indonesia, NU Online menyebutnya dengan kelompok ekstrem kanan dan penganut konservatisme sebagai identitas mereka. Pada berita yang berjudul *“Paham Khilafah Potensial Lahirkan Konflik bagi Keutuhan Bangsa”* (06/09/2020), NU Online menampilkan identitas kelompok-kelompok ini sebagai kelompok ekstrem kanan, *“Masdar Hilmy memberikan pengantar bahwa ada dua kelompok ekstrem yang tidak setuju dengan konsep dasar bangsa dan negara. Yakni kelompok ekstrem kiri yakni kalangan non agama dan kanan yakni kelompok agama. Kelompok kiri adalah komunisme, ateisme, sekulerisme, dan kapitalisme. Sedangkan kelompok kanan adalah khilafah dan jihadisme atau terorisme”*. Sedangkan identitas mereka sebagai kelompok konservatisme ditampilkan NU Online pada berita berjudul *“Kontra Narasi atas Ideologi Khilafah Tetap Diperlukan, Tapi...”* (31/07/2020), yang isinya, *“narasi khilafah tidak segan-segan menggunakan momentum apapun untuk menjadi bahan propagandanya, termasuk isu pandemi Corona, atau komunisme dalam sengketa kasus RUU HIP. Dalam berbagai kesempatan, kerap kali narasi khilafah menyelinap dan menggunakan keadaan untuk mempromosikan konservatisme dan sering pada akhirnya mendorong ideologi khilafah”*.

Tabel 3. Analisis Teks suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Dasar Negara Pancasila

Elemen Analisis Teks	Media Online	
	Suaramuhammadiyah.id	NU Online
Representasi	Negara Pancasila sebagai <i>Darul Ahdi wa Syahadah</i> (Negara Kesepakatan dan Kesaksian).	Pancasila itu islami, dan Islam tidak bertentangan dengan Pancasila.
Relasi	Suaramuhammadiyah.id sebagai alat Muhammadiyah melawan diskursus Negara Islam. Relasi suaramuhammadiyah dengan khalayak pembacanya atau warga Muhammadiyah	NU Online sebagai alat kekuasaan PBNU untuk melawan dan menandingi diskursus Negara Islam. Relasi NU Online dengan pembacanya (<i>Nahdliyin</i>)

	bersifat simetris, pada posisi yang sama menentang diskursus Negara Islam. Relasi suaramuhammadiyah.id dengan kelompok-kelompok muslim radikal sebagai dua pihak yang oposisional mengenai dasar negara Pancasila.	bersifat timbal balik dan saling menguatkan untuk melawan radikalisme. Relasi NU Online dengan kelompok-kelompok muslim radikal sebagai kelompok berseberangan yang memiliki kekuatan yang mesti dilawan.
Identitas	Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Berkemajuan, yang berpaham Negara Pancasila sebagai <i>Darul Ahdi wa Syahadah</i> . Identitas suaramuhammadiyah.id identik dengan identitas Muhammadiyah yang mengikuti doktrin Islam Berkemajuan. Identitas pembaca suaramuhammadiyah.id juga dapat diidentifikasi dengan Muhammadiyah yang beridentitas Islam Berkemajuan. Identitas kelompok-kelompok muslim radikal disebutkan sebagai kelompok konservatif dan islamisme.	Identitas NU sebagai organisasi organisasi Islam <i>wasathiyah</i> (tengahan). Identitas NU diidentifikasi sebagai media yang berpaham Aswaja yang moderat dan toleran. Identitas pembaca NU Online adalah <i>Nahdliyin</i> yang juga berpaham Aswaja karena sebagian besar pembacanya adalah <i>Nahdliyin</i> . Identitas kelompok-kelompok muslim radikal disebutkan sebagai kelompok ekstrem kanan dan konservatif.

a) Representasi Kontra-Diskursus Radikalisme pada Isu Jihad

Representasi dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana gagasan atau ide mengenai kontra-diskursus radikalisme pada isu dasar negara Pancasila ditampilkan dan digambarkan dalam isi media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Berdasarkan analisis teks (*critical linguistic*) pada isi-isi media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online, representasi kontra-diskursus radikalisme pada isu jihad yang ditampilkan dan digambarkan oleh kedua media online tersebut adalah sebagai berikut. Pada dasarnya, representasi kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad yang dimunculkan oleh kedua media online resmi

organisasi Islam Muhammadiyah dan NU ini merupakan perlawanan, tandingan, atau kontestasi atas diskursus jihad sebagai kekerasan, perang, dan terorisme yang sering digagas dan dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim radikal.

Representasi suaramuhammadiyah.id. Sebagai media resmi organisasi Islam Muhammadiyah yang berkembang, suaramuhammadiyah.id sama sekali tidak menampilkan diskursus jihad sebagai kekerasan, perang, apalagi terorisme. Suaramuhammadiyah.id justru banyak menampilkan makna-makna jihad lain yang lebih kontekstual di Indonesia sebagai kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad ini. Secara khusus suaramuhammadiyah.id merepresentasikan makna jihad sebagai perjuangan menghadapi sesuatu (*jihad lil-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama.

Representasi *jihad lil-muwajahah* sebagai bingkai utama kontra-diskursus radikalisme ditampilkan suaramuhammadiyah.id pada judul “*Haedar Nashir: Bergerak Dari Jihad Lil-Muaradhah Ke Jihad Lil-Muwajahah*” (02/07/2017)”. Dalam berita tersebut dituliskan, “*Haedar menyatakan bahwa inilah yang disebut Muhammadiyah sebagai era al-jihad lil-muwajahah, yakni perjuangan sungguh-sungguh membangun sesuatu yang unggul sebagai pilihan terbaik atas hal yang tidak dikehendaki. Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua antara lain disebutkan. Bahwa umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (al-jihad li-al-muaradhah) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (al-jihad li-al-muwajahah) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama*”.

Representasi *jihad lil-muwajahah* sebagai kontra-diskursus radikalisme kemudian dijabarkan dan diimplementasikan dalam makna-makna jihad yang lebih kontekstual untuk menjawab permasalahan-

permasalahan umat. Makna-makna jihad kontekstual yang direpresentasikan suaramuhammadiyah.id sebagai kontra-diskursus radikalisme di antaranya adalah jihad konstitusi, jihad antikorupsi, jihad ekonomi, jihad politik, jihad literasi, jihad sosial, dan jihad melawan Covid-19. Artikel-artikel dan berita-berita suaramuhammadiyah.id yang menampilkan dan menggambarkan makna-makna jihad sebagai kontra-diskursus radikalisme di antaranya adalah *“Ketua Komisi Yudisial: Jihad Konstitusi Sebagai Jalan Muhammadiyah Mewujudkan Keadilan Sosial”* (10/02/2017), *“SATGAS Muda Siapkan Motivator Jihad Anti Korupsi”* (12/01/2016), *“Ketum PP Aisyiyah: Jihad Ekonomi Jadi Agenda Strategis Aisyiyah Makmurkan Bangsa”* (20/01/2018), *“Prof Zainudddin Maliki: Jihad Politik Salah Satunya Untuk Perbaiki Sulaman Negeri”* (26/12/2018), *“Launching ‘Taman Pustaka 38’, IMM Makassar Timur Gelorakan Jihad Literasi”* (29/09/2018), *“Muhammadiyah Dan ‘Aisyiyah Provinsi Riau Lakukan Jihad Sosial Lawan Tuberculosis”* (28/08/2017), dan *“Haedar Nashir: Membantu Dhuafa Melawan Wabah Corona Jihad Fisabilillah”* (07/05/2020).

Representasi NU Online. Sebagai media resmi dari organisasi Islam NU yang moderat, NU Online merepresentasikan makna jihad alih-alih sebagai tindak kekerasan, perang, dan terorisme, tapi justru menegaskan penolakannya terhadap makna-makna jihad tersebut. Penentangan NU Online terhadap makna jihad sebagai kekerasan dan perang dimunculkan oleh NU Online pada artikel-artikel berikut, *“Makna Resolusi Jihad Bukan Lagi dengan Angkat Senjata”* (24/10/2018), *“KH Yusuf Chudlori: Jihad Tidak Selalu Bermakna Perang”* (26/01/2019), *“Ke Suriah atas Nama Jihad? Syekh Taufiq Al-Buthi: Mereka Tidak Mengerti Islam”* (13/03/2019), dan *“Soal Ekstremisme dan Salah Paham Memaknai Jihad Soal Ekstremisme dan Salah Paham Memaknai Jihad”* (14/11/2019).

Sebaliknya, NU Online banyak menampilkan dan menggambarkan makna jihad secara lebih kontekstual sebagai kontra-diskursus

radikalisme. Makna-makna jihad yang direpresentasikan NU Online untuk menandingi diskursus makna jihad sebagai tindak kekerasan, perang, dan terorisme di antaranya adalah jihad melawan narkoba, jihad media sosial (melawan hoaks), jihad antikorupsi, jihad melawan kemiskinan dan kebodohan, jihad lingkungan hidup, jihad budaya, ekonomi, dan Pendidikan, serta jihad menjaga perbatasan.

Makna-makna jihad kontekstual sebagai kontra-diskursus radikalisme di atas direpresentasikan oleh NU Online dalam artikel-artikel atau berita-berita berikut: *“Ansor Surabaya Kumandangkan Jihad Lawan Narkoba”* (05/09/2017), *“Kumpulkan Kiai dan Nyai, PSP Perkuat Jihad Lawan Radikalisme Berbasis Medsos”* (29/06/2018), *“Jihad Lawan Hoaks, Ketua PCNU Pringsewu Ajak 'Klik' NU Online”* (22/03/2018), *“Ingin Jihad? Ketua PBNU: Mari Lawan Korupsi”* (24/04/2019), *“Jihad saat Ini Perangi Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan”* (24/08/2019), *“Mengurangi Limbah Plastik, Jihad yang Butuh Dukungan Semua Pihak”* (26/06/2019), *“Jihad Itu di Bidang Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan, Bukan Ngebom!”* (21/01/2016), dan *“Gus Tutut: Jaga Perbatasan Bagian dari Jihad”* (18/08/2016).

b) Relasi dalam Kontra-Diskursus Radikalisme pada Isu Jihad

Relasi berkaitan dengan hubungan antarpartisipan, yakni pembuat teks (wartawan atau redaktur), khalayak pembaca, dan partisipan publik (politisi, tokoh, ulama, dan sebagainya) ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Analisis relasi ini bertujuan untuk memahami konstruksi realitas media yang terbentuk berdasarkan kontestasi kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, partisipan atau pihak-pihak yang berelasi dalam teks adalah (1) wartawan/redaktur suaramuhammadiyah.id dan NU Online, (2) pembaca/warga Muhammadiyah dan NU, dan (3) kelompok-kelompok muslim radikal.

Relasi suaramuhammadiyah.id. Sebagai media resmi organisasi Islam Muhammadiyah, relasi suaramuhammadiyah.id dengan organisasi

Muhammadiyah adalah sebagai corong yang menyuarakan pandangan-pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam Berkemajuan. Maka dari itu, dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad, suaramuhammadiyah.id merepresentasikan pandangan-pandangan Muhammadiyah mengenai makna jihad. Hal ini tidak lepas juga karena wartawan dan redaktur suaramuhammadiyah.id adalah warga dan pimpinan Muhammadiyah. Mengenai suaramuhammadiyah.id yang membawa kepentingan Muhammadiyah dalam upaya kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad ditampilkan oleh suaramuhammadiyah dalam artikel dan berita berikut: *“Jihad Pergerakan Muhammadiyah”* (16/07/2020), dan *“Haedar Nashir: Bergerak Dari Jihad Lil-Muaradhah Ke Jihad Lil-Muwajahah”* (02/07/2017). Pada judul yang pertama dituliskan, *“usaha yang dilakukan Muhammadiyah tersebut sesungguhnya dapat dikatakan sebagai aktualisasi jihad pergerakan Islam untuk mengeluarkan umat dan bangsa dari kondisi keterjajahan, ketertinggalan, dan kebodohan menuju kehidupan yang berkembang. Karenanya seluruh usaha Muhammadiyah itu sejatinya merupakan jihad fisabilillah, yang menurut Tarjih disebut sebagai “badlul-juhdi” atau usaha yang sungguh-sungguh sebagai “jalan yang membawa pada keridhaan Allah dengan cara menegakkan kalimat-Nya dan menerapkan hukum-hukum-Nya”*

Relasi suaramuhammadiyah.id dengan pembacanya dapat dikatakan sebagai relasi yang simetris atau sekubu dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad. Pembaca suaramuhammadiyah.id sebagian besar adalah warga Muhammadiyah yang memiliki kesamaan pandangan baik dengan Organisasi Muhammadiyah maupun dengan suaramuhammadiyah.id. Mereka sama-sama memaknai jihad bukan sebagai kekerasan atau peperangan, tapi jihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan sesuatu yang unggul. Relasi suaramuhammadiyah.id dan pembacanya dalam konteks pemahaman yang sama mengenai makna jihad sebagai kontra-diskursus radikalisme

dapat dilihat pada berita-berita berikut: *“Ingin Indonesia Berdaulat, MPM Gelorakan Jihad Kedaulatan Pangan”* (30/12/2016), *“Berantas TB Bagi Kader ‘Aisyiyah Adalah Jihad Sosial’* (21/09/2018), dan *“Launching ‘Taman Pustaka 38’, IMM Makassar Timur Gelorakan Jihad Literasi”* (29/09/2018).

Relasi suaramuhammadiyah.id dengan khalayak lain, yaitu kelompok-kelompok muslim radikal dalam konteks pemaknaan jihad tentu saja saling berlawanan atau asimetris. Suaramuhammadiyah.id dan pembacanya lebih memaknai jihad sebagai upaya sungguh-sungguh menciptakan sesuatu yang unggul dan diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan, sementara kelompok-kelompok muslim radikal lebih memaknai jihad sebagai tindak kekerasan, peperangan, dan bahkan terorisme. Relasi suaramuhammadiyah.id dengan kelompok-kelompok muslim radikal dalam konteks kontra-diskursus radikalisme ditampilkan oleh suaramuhammadiyah.id dalam berita-berita berikut. *“Memahami Perang Atas Nama Jihad”* (06/05/2016), *“Jihad Perang Dan Jihad Damai”* (25/02/2019), dan *“Prof Muhadjir Effendy: Jihadis Memang Doktrin Islam”* (26/08/2016). Dalam artikel berjudul *“Jihad Perang Dan Jihad Damai”*, dituliskan, *“para ulama berpendapat bahwa jihad bukan hanya berhadapan dengan non-muslim, tetapi, berjuang untuk perbaikan dalam tubuh umat Islam termasuk jihad. Maka, jihad itu dapat berupa harta, jiwa, tenaga, dan pikiran. Membangun sarana pendidikan dan menyelenggarakannya, membangun sarana transportasi, bahkan berbakti kepada orang tua masing-masing disebut jihad”*.

Relasi NU Online. Posisi NU Online adalah sebagai media resmi NU yang berfungsi menyuarakan kepentingan-kepentingan dan pemikiran-pemikiran NU sekaligus sebagai media informasi bagi warga NU (*Nahdliyin*). Dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad, relasi NU Online dengan organisasi NU adalah dalam posisi yang sama, di mana keduanya menolak pandangan yang kelompok-kelompok yang memaknai jihad sebagai kekerasan dan peperangan. NU

Online mendukung NU dalam memaknai jihad secara lebih damai dan kontekstual dengan situasi di Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk jihad seperti jihad antinarkoba, jihad melawan hoaks, jihad antikorupsi, dan jihad-jihad damai lainnya. Relasi NU Online dengan organisasi NU yang sejiwa dalam memandang makna jihad sebagai kontra-diskursus radikalisme adalah karena sebagian besar wartawan dan redaktur NU Online adalah anggota dan pengurus NU yang memiliki nilai-nilai Aswaja yang kuat.

Relasi yang sekufu antara NU Online dan organisasi NU dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad ditampilkan oleh NU Online dalam artikel-artikel dan berita-berita berikut: “Kiai Said Jelaskan Empat Macam Jihad” (23/10/2017), “Trilogi Jihad Zaman Now” (24/05/2018), “Makna Resolusi Jihad Bukan Lagi dengan Angkat Senjata” (24/10/2018), “Ketua NU Jateng: Nasionalisme dan Patriotisme adalah Jihad Aswaja” (25/06/2019). Pada judul “Trilogi Jihad Zaman Now”, dituliskan *“Di era modern seperti sekarang ini jihad bukan lagi mengangkat senjata atau menebar teror, karena jihad seperti itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada. Di era modern ini orang sudah tidak lagi berpikir untuk berjihad seperti zaman Rasul yang berperang melawan musuh dengan segenap persenjataan dan siap untuk mati”*.

Relasi NU Online dengan pembacanya dapat dipastikan bersifat simetris juga karena sebagian besar pembaca NU Online adalah Nahdliyin yang mengikuti paham Aswaja. Dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad, NU Online dan pembaca berada dalam satu pihak yang menentang pemaknaan jihad sebagai tindak kekerasan dan peperangan sebagaimana seringkali diwacanakan dan dipraktikkan oleh kelompok-kelompok muslim radikal. NU Online dan tentu saja pembacanya lebih menerima makna jihad secara kontekstual dengan situasi Indonesia yang damai. Relasi NU Online dengan pembacanya yang lebih memaknai jihad secara lebih kontekstual dimunculkan oleh

NU Online dalam artikel-artikel dan berita-berita di antaranya berikut ini. *“Warga Lakardowo Jihad Melawan Limbah PT. PRIA”* (06/12/2019), *“Kumpulkan Kiai dan Nyai, PSP Perkuat Jihad Lawan Radikalisme Berbasis Medsos”* (26/09/2018), *“Jihad Lawan Hoaks, Ketua PCNU Pringsewu Ajak 'Klik' NU Online”* (22/03/2018), *“Bersama Pergunu, Santri Al-Karimiyah Depok Galakkan Jihad Pena”* (06/10/2018), dan *“Ketua Ansor Jateng: Pemudik adalah Jihad fi Sabilillah”* (11/06/2018).

Relasi NU Online dengan khalayak atau publik lain, yakni kelompok-kelompok muslim radikal adalah memposisikannya sebagai lawan yang berseberangan dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad. NU Online dan pembacanya (Nahdliyin) memandang jihad secara kontekstual dengan berbagai wujudnya seperti jihad antinarkoba, jihad antikorupsi, jihad antihoaks, jihad ekonomi, dan sebagainya. Sementara kelompok-kelompok muslim radikal lebih memaknai jihad dalam bentuk kekerasan dan peperangan.

Relasi NU Online dengan kelompok-kelompok muslim radikal dalam konteks kontra-diskursus radikalisme ditampilkan oleh NU Online dalam artikel-artikel dan berita-berita di antaranya sebagai berikut: *“Soal Ekstremisme dan Salah Paham Memaknai Jihad”* (14/11/2019), *“Ke Suriah atas Nama Jihad? Syekh Taufiq Al-Buthi: Mereka Tidak Mengerti Islam”* (13/03/2019), *“KH Yusuf Chudlori: Jihad Tidak Selalu Bermakna Perang”* (06/01/2019). Pada judul *“Soal Ekstremisme dan Salah Paham Memaknai Jihad”*, ditulis *“Tragedi tersebut menambah daftar panjang kasus terorisme di Indonesia. Kriminal yang dilakukan oleh kelompok ekstremis ini tidak terlepas dari pola pemahaman keagamaan dan ideologi ekstrem dalam memandang nash (Al-Qur'an dan Hadits) secara tekstual sehingga mereka mau meledakkan dirinya sendiri dan melukai serta membunuh orang lain demi jaminan surga dan bidadari menurut doktrin yang berkembang di kalangan jihadis-ekstrem tersebut”*.

c) **Identitas dalam Kontra-Diskursus Radikalisme pada Isu Jihad**

Identitas dalam analisis teks ini berkaitan dengan identitas partisipan, yakni pembuat teks (wartawan atau redaktur), khalayak pembaca, dan partisipan publik (politisi, tokoh, ulama, dan sebagainya) ditampilkan dan digambarkan dalam teks, termasuk bagaimana pembuat teks mengidentifikasikan dirinya dalam wacana yang ditampilkan. Identitas yang digambarkan oleh *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online dalam teks masing-masing dalam konteks ini tentu saja berkaitan dengan kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara Pancasila.

Identitas *suaramuhammadiyah.id*. Dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad, *suaramuhammadiyah.id* menyebutkan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid (dalam judul: *Jihad Pergerakan Muhammadiyah*, 16/07/2020), dan organisasi berkemajuan (dalam judul: *Haedar Nashir: Bergerak Dari Jihad Lil-Muaradhah Ke Jihad Lil-Muwajahah*, 02/07/2017). *Suaramuhammadiyah.id* tidak menyebut secara eksplisit identitasnya dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad. Meskipun demikian, sebagai media resmi Muhammadiyah, identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid, serta berkemajuan dapat dilekatkan juga sebagai identitas *suaramuhammadiyah.id*. Selain itu, pelekatan identitas *suaramuhammadiyah.id* dalam identitas Muhammadiyah karena sebagian besar wartawan dan redaktur *suaramuhammadiyah.id* adalah anggota dan pimpinan Muhammadiyah yang berpola pikir berkemajuan dan memiliki perspektif dakwah dan tajdid juga.

Identitas pembaca *suaramuhammadiyah.id* pun tidak disebutkan secara eksplisit oleh *suaramuhammadiyah.id*, meskipun dapat diidentifikasi bahwa pembaca *suaramuhammadiyah.id* sebagian besar adalah warga Muhammadiyah. Dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad ini, identitas pembaca

suaramuhammadiyah.id dapat diidentikkan juga dengan Muhammadiyah sebagai organisasinya, yakni berkemajuan, bertajdid, dan berdakwah. Berkemajuan berarti berpikir maju, termasuk dalam memahami makna jihad yang tidak lagi sebagai peperangan, tapi menciptakan suatu alternatif yang unggul. Pandangan-pandangan jihad yang berkemajuan sebagai identitas pembacanya ditampilkan oleh suaramuhammadiyah.id dalam berita-berita dan artikel-artikel di antaranya berikut ini. *“Prof Zainuddin Maliki: Jihad Politik Salah Satunya Untuk Perbaiki Sulaman Negeri”* (26/12/2018), *“Ketua Komisi Yudisial: Jihad Konstitusi Sebagai Jalan Muhammadiyah Mewujudkan Keadilan Sosial”* (10/02/2017), *“Ketum PP Aisyiyah: Jihad Ekonomi Jadi Agenda Strategis Aisyiyah Makmurkan Bangsa”* (20/01/2018), dan *“Okky Madasari: Sastra Sebagai Jihad Anti Korupsi”* (10/12/2020).

Identitas khalayak lain, yakni kelompok-kelompok muslim radikal dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad ditampilkan dan digambarkan oleh suaramuhammadiyah.id sebagai jihadis, dan sekelompok orang yang mengatasnamakan Tuhan sebagai identitasnya. Dalam berita yang berjudul *“Prof Muhadjir Effendy: Jihadis Memang Doktrin Islam”* (02/06/2018) dituliskan bahwa *“Jihadis memang doktrin Islam. Nggak perlu mengelak, jika jihad memang ajaran Islam untuk berjuang menuju puncak kejayaan, kata Prof Dr Muhadjir Effendy yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Khutbah Jum’at (26/8/16) di Masjid Gede Yogyakarta. Tetapi jihad bagaimana yang sesuai ajaran Allah. Menurut Muhadjir, jihad yang disertai sabar. Hampir ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad, dengan amar ma’ruf nahi mungkar, dikunci dengan kata sabar”*. Sedangkan identitas sebagai sekelompok orang yang mengatasnamakan Tuhan terdapat pada judul *“Memahami Perang Atas Nama Jihad”* (06/05/2016), *“ada kalanya sekelompok orang yang mengatasnamakan Tuhan, kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap yang berbeda keyakinan. Hal ini kemudian dimaknai sebagai*

aktivitas dalam kerangka jihad. Mereka yang melakukan kekerasan demikian, sering bersandar pada ayat tentang peperangan dalam Al-Qur'an".

Identitas NU Online. Organisasi NU merupakan organisasi Islam yang berpaham *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) yang moderat dan toleran. Maka dari itu, dalam memaknai jihad NU juga merujuk pada nilai-nilai Aswaja yang anti-kekerasan dan penuh toleransi, yang disebut sebagai jihad Aswaja (dalam judul: "*Ketua NU Jateng: Nasionalisme dan Patriotisme adalah Jihad Aswaja*", 25/06/2019).

Mengenai identitas NU Online sebagai media resmi NU dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad, secara eksplisit memang tidak disebutkan. Tapi fungsi dan peran NU Online sebagai media jihad warga NU sangat vital, terutama jihad melawan hoaks atau berita bohong, sebagaimana yang ditampilkan dalam judul, "*Jihad Lawan Hoaks, Ketua PCNU Pringsewu Ajak 'Klik' NU Online*" (22/03/2018). Meskipun demikian, identitas NU Online dapat disandingkan dengan identitas NU sebagai organisasi Islam yang berpaham Aswaja yang moderat dan toleran. Sehingga dalam memaknai jihad pun adalah jihad yang sesuai dengan nilai-nilai Aswaja, seperti jihad anti-korupsi, jihad melawan hoaks, jihad melawan narkoba, jihad peduli lingkungan, dan makna-makna jihad kontekstual lainnya. Sebagaimana ditampilkan oleh NU Online dalam berita-berita dan artikel-artikel berikut ini: "*Ingin Jihad? Ketua PBNU: Mari Lawan Korupsi*" (24/04/2019), "*Jihad Zaman Now Juga Merambah Dunia Maya*" (26/08/2019), "*Ansor Surabaya Kumandangkan Jihad Lawan Narkoba*" (05/09/2017), dan "*Mengurangi Limbah Plastik, Jihad yang Butuh Dukungan Semua Pihak*" (26/06/2019).

Identitas pembaca NU Online tidak secara jelas disebutkan seperti apa dalam pemberitaan-pemberitaannya mengenai kontra-diskursus radikalisme mengenai jihad. Meskipun demikian, karena sebagian besar pembaca NU Online adalah Nahdliyin, maka identitas NU organisasi

sebagai organisasi Islam yang berpaham Aswaja dapat juga disematkan pada identitas pembaca NU Online. Paham Aswaja yang bersifat moderat dan toleran menjadikan pemahaman pembaca NU Online dalam memahami makna jihad juga lebih moderat dan antikekerasan. Dalam pemaknaan pembaca NU, jihad bukanlah tindak kekerasan dan peperangan tapi jihad damai dan kontekstual. Pemahaman jihad pembaca NU Online yang sesuai dengan doktrin Aswaja ditampilkan oleh NU Online di antaranya dalam berita-berita dan artikel-artikel berikut: *“Tugas Santri Gelorakan Ruhul Jihad untuk Menjawab Tantangan Zaman”* (26/10/2020), *“Tak Cukup Kuasai Pengetahuan Agama, Santri Perlu Jihad di Medsos”* (14/10/2019), *“Rijalul Ansor Jakarta Timur Siap Jihad Lawan Hoaks”* (28/03/2018), *“Ansor Surabaya Kumandangkan Jihad Lawan Narkoba”* (05/09/2017), dan *“Gus Tutut: Jaga Perbatasan Bagian dari Jihad”* (18/08/2016).

Identitas khalayak lain, yakni kelompok-kelompok muslim radikal dalam konteks kontra-diskursus radikalisme mengenai isu jihad ditampilkan dan digambarkan sebagai jihadis ekstrem atau kelompok ekstrem sebagai identitasnya. Identitas ini berbeda dengan identitas pembaca NU Online karena jihadis ekstrem ini melakukan bom bunuh diri atas nama jihad. Identitas jihadis ekstrem ini ditampilkan dan digambarkan oleh NU Online dalam berita yang berjudul *“Soal Ekstremisme dan Salah Paham Memaknai Jihad”* (14/11/2019), yang isinya bahwa, *“kejahatan bom bunuh diri yang terjadi di Markas Polres Kota Besar (Mapolrestabes) Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 13 November 2019 sekitar pukul 08.45 WIB kembali menghentak pandangan mata bangsa Indonesia. Tragedi tersebut menambah daftar panjang kasus terorisme di Indonesia. Kriminal yang dilakukan oleh kelompok ekstremis ini tidak terlepas dari pola pemahaman keagamaan dan ideologi ekstrem dalam memandang nash (Al-Qur'an dan Hadits) secara tekstual sehingga mereka mau meledakkan dirinya sendiri dan*

melukai serta membunuh orang lain demi jaminan surga dan bidadari menurut doktrin yang berkembang di kalangan jihadis-ekstrem tersebut.

Tabel 4. Analisis Teks suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai Kontra-Diskursus Radikalisme dalam Isu Jihad

Elemen Analisis Teks	Media Online	
	Suaramuhammadiyah.id	NU Online
Representasi	Makna jihad sebagai <i>jihad lil-muwajahah</i> (berjuang menghadapi sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang unggul) yang diwujudkan dalam bentuk jihad konstitusi, jihad antikorupsi, jihad ekonomi, jihad politik, jihad literasi, jihad sosial, dan jihad melawan Covid-19.	Menentang makna jihad sebagai tindak kekerasan dan perang, dan lebih menggambarkan jihad secara lebih kontekstual dengan situasi di Indonesia seperti jihad melawan narkoba, jihad media sosial (melawan hoaks), jihad antikorupsi, jihad lingkungan hidup, dan sebagainya.
Relasi	Relasi suaramuhammadiyah.id dengan organisasi Muhammadiyah dan pembacanya lebih bersifat simetris atau sekutu yang memandang jihad sebagai <i>jihad lil-muwajahah</i> , daripada jihad kekerasan dan peperangan. Relasi suaramuhammadiyah.id dengan khalayak lainnya, yaitu kelompok-kelompok muslim radikal adalah asimetris atau berlawanan karena pemahaman yang berbeda mengenai jihad.	Relasi NU Online dengan Organisasi NU dan pembacanya (Nahdliyin) adalah sekutu, yang memaknai jihad secara lebih kontekstual dan menentang pemaknaan jihad kekerasan dan perang. Relasi NU Online dengan publik lain, yakni kelompok-kelompok muslim radikal adalah berlawanan, karena pemaknaan yang berbeda mengenai jihad.
Identitas	Identitas suaramuhammadiyah.id sama dengan identitas Muhammadiyah sebagai organisasi Islam Berkemajuan. Identitas pembaca suaramuhammadiyah.id juga berpaham Islam Berkemajuan.	Identitas NU Online mengikuti atau sama dengan identitas NU sebagai organisasi Islam berpaham Aswaja. Identitas pembaca NU Online juga berpaham Aswaja karena mereka adalah Nahdliyin.

	Identitas publik lain, yakni kelompok-kelompok muslim radikal adalah jihadis yang mengatasnamakan Tuhan.	Identitas khalayak lain, yakni kelompok-kelompok muslim radikal adalah jihadis ekstrem atau kelompok ekstrem.
--	--	---

2) Analisis Praktik Diskursus

Analisis praktik diskursus (*discourse practice*) merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses penelaahan produksi teks dan konsumsi teks. Dalam analisis ini dikaji mengenai, pertama bagaimana produksi teks-teks mengenai kontra-diskursus radikalisme di suaramuhammadiyah.id dan NU Online? Kedua, bagaimana konsumsi teks-teks mengenai kontra-diskursus radikalisme di suaramuhammadiyah.id dan NU Online? Untuk itu, dalam analisis ini akan dideskripsikan hasil wawancara dengan redaktur suaramuhammadiyah.id dan NU Online, dan wawancara dengan anggota atau tokoh Muhammadiyah dan NU sebagai konsumen (pembaca) suaramuhammadiyah.id dan NU Online.

a) Analisis Produksi Teks Kontra-Diskursus Radikalisme

Produksi teks suaramuhammadiyah.id. Sebagai media resmi organisasi Muhammadiyah, suaramuhammadiyah.id memiliki visi “Menjadi Media Utama Muhammadiyah dan Islam di Indonesia”. Menurut Rizki Putra Dewantoro, Managing Editor dan Reporter suaramuhammadiyah.id, misi atau tujuan suaramuhammadiyah.id adalah (1) merekam denyut Muhammadiyah, (2) memperkenalkan profil dan kontribusi Muhammadiyah pada masyarakat dunia, (3) menyebarkan syiar Islam Berkemajuan, dan (4) mendorong produktivitas dan kreativitas kajian tentang Muhammadiyah dan Islam².

Fungsi dan posisi suaramuhammadiyah.id bagi Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah adalah sebagai sayap media resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Majalah Suara Muhammadiyah) untuk menyebarkan

² Wawancara dengan Peneliti melalui WhatsApp (WA), 1 September 2021.

syiar Islam Berkemajuan. Maka dari itu, menurut Rizki Putra Dewantoro, Managing Editor dan Reporter suaramuhammadiyah.id, dalam diskursus radikalisme mengenai isu negara Islam dan jihad sebagai perang, suaramuhammadiyah.id memiliki pandangan yang sama dengan pendapat dan prinsip Muhammadiyah tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Seperti mengikuti pandangan Haedar Nashir, Ketua Umum PP. Muhammadiyah, mengenai radikalisme agama yang ditampilkan suaramuhammadiyah.id dalam salah satu isinya berikut.

“Kenyataan ada radikalisme ekstrem dan mengandung kekerasan pada segelintir kelompok Islam seperti digelorkan Al-Qaida, ISIS, Jamaah Islamiyah, dan gerakan-gerakan serupa terutama yang dilarang di dunia Muslim. Kita semua menentang radikalisme agama seperti itu, termasuk jika dikembangkan di Indonesia. Kita juga secara tegas tidak bersetuju dengan gerakan Islam yang mengusung paham dan aksi menegakkan kekhalifahan atau negara Islam di Indonesia. Semua atau mayoritas terbesar umat Islam sudah bersepakat bahwa Indonesia ialah negara hasil konsensus nasional di mana Pancasila sebagai dasar negara sejalan dengan Islam, yang dalam terminologi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern terbesar di Indonesia dideklarasikan sebagai “Darul Ahdi Wasyahadah”, yakni negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan hasil konsensus nasional seluruh golongan termasuk umat Islam yang tidak boleh diingkari oleh siapapun namun harus diisi atau dibangun sesuai dengan cita-cita kemerdekaan menuju negara yang berkemajuan”³.

Menurut Rizki Putra Dewantoro, Managing Editor dan Reporter suaramuhammadiyah.id, mengenai kontra-diskursus radikalisme, sebenarnya suaramuhammadiyah.id tidak secara langsung melawan radikalisme itu, tapi lebih dengan mengedepankan moderasi⁴. Jalan moderasi sebagai kontra-diskursus radikalisme yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id ini mengikuti sikap organisasi Muhammadiyah dan pandangan-pandangan tokoh Muhammadiyah yang ditampilkan dalam berita-berita dan artikel-artikel di

³ Multiaspek tentang Radikalisme - Suara Muhammadiyah, diakses pada 2 September 2021, 10.00.

⁴ Wawancara dengan Peneliti melalui WhatsApp (WA), 1 September 2021.

suaramuhammadiyah.id. Sebagai contohnya, Rizki menunjukkan isi suaramuhammadiyah.id berikut.

“Di berbagai kesempatan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir selalu menyatakan agar pemerintah tidak terjebak dalam program deradikalisme. Apalagi menjalankan program itu secara nasional. Kalau program deradikalisme diterapkan secara nasional malah akan menciptakan suasana yang menegangkan di seluruh negeri. Daerah yang aman menjadi ikut tidak nyaman. Orang yang tidak tahu malah tertarik untuk ikut menjadi radikal. Selain itu, Muhammadiyah juga selalu mengingatkan pemerintah agar menciptakan kebijakan yang adil yang dapat mensejahterakan rakyat serta menciptakan rasa aman. Muhammadiyah juga mengusung moderasi Islam sebagai ganti dari program deradikalisme yang telah gagal tersebut, Dengan menyebar luaskan pemahaman Islam moderat, paham radikal itu akan tergerus dengan sendirinya”⁵.

Berkaitan dengan relasi dengan kelompok-kelompok muslim radikal, suaramuhammadiyah.id lebih mementingkan tindakan amar makruf nahi munkar. Menurut Rizki Putra Dewantoro, Managing Editor dan Reporter suaramuhammadiyah.id, bahwa prinsip suaramuhammadiyah.id sama seperti Muhammadiyah yaitu beramar makruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan menyegah kemungkaran). Beramar makruf dengan cara yang makruf, dan bernahi munkar dengan cara makruf juga. Termasuk mengedepankan moderasi dan memasifkan narasi-narasi alternatif yang mencerahkan. Misalnya mewartakan berbagai kegiatan positif Muhammadiyah, kegiatan relawan, pembangunan Amal Usaha, prestasi kader Muhammadiyah dan sebagainya, agar masyarakat dan jamaah dapat lebih produktif dalam mengisi kesehariannya⁶. Sebagai contoh relasi ini, Rizki menunjukkan isi suaramuhammadiyah.id berikut.

“Tantangan yang dihadapi Islam dan umatnya dewasa ini begitu berat dan berliku. Selain persoalan imoralitas para aktivispolitik, dengan kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran moral susial; Islam beserta umatnya kini tengah ditempa berbagai tuduhan negatif. Sebagai agama yang melegitimasi kekerasan disebabkan segelintir orang yang memahami makna jihad sebagai *war*, *fighting* dan *militancy* (perang, peperangan, dan

⁵ Suara Muhammadiyah Gelar Seminar Moderasi: Antitesis Radikalisme dan Deradikalisme - Suara Muhammadiyah, diakses pada 2 September 2021.

⁶ Wawancara dengan Peneliti melalui WhatsApp (WA), 1 September 2021.

militansi). Akibat dari pemahaman itu, dimana ada ketidak sesuaian dengan aspek sosiologis dan teologis, pemahaman atas kata *jihad* telah menutupi riak keagungan *rahmatan lil alamin* Islam serta mengikis ajaran perdamaian dalam Islam. Karena itu, kita tidak menginginkan Islam dipersepsi sebagai agama kekerasan serta pencetak radikalisme dan teorisme. Tugas kita saat ini ialah membersihkan Islam dari tafsir *a-historis* dan rendah tentang makna jihad di dalam Islam”⁷.

Produksi teks NU Online. Sebagai media resmi organisasi NU, perhatian utama NU Online adalah mewartakan pandangan ke-Islaman Nahdliyah atau Aswaja. NU Online adalah sebagai outlet media resminya NU, di mana NU Online mempublikasikan pandangan-pandangan resmi Pengurus Besar NU (PBNU), keputusan-keputusan organisasi, dan juga gagasan-gagasan yang berkembang di lingkungan Nahdliyin. Menurut Syafiq Ali, Direktur NU Online, pada dasarnya fungsi NU Online adalah untuk membicarakan NU sebagai organisasi masyarakat. Lebih lanjut mengenai NU Online Syafiq mengatakan:

“NU Online sebagai media sendiri yang bisa menjadi rujukan warga NU dalam mengambil sikap, atau mencari tahu informasi terkait keputusan-keputusan internal NU. Karena seringkali, bertahun-tahun warga NU itu mendapat informasinya sebagian besar dari media luar, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya ke-NU-an. Untuk statemen tokoh NU bacanya dari media luar, keputusan-keputusan NU bacanya dari media luar yang seringkali ada distorsi karena banyak wartawan umum yang tidak memahami istilah-istilah khusus ke-NU-an, atau konteks yang tidak begitu dipahami. NU online fungsinya ya media resmi NU untuk mewartakan”⁸.

Di samping itu, bagi NU dan Nahdliyin, NU Online berfungsi sebagai media penyebar visi dan misi NU. Misalnya mengenai penerimaan Pancasila sebagai dasar negara di kalangan Nahdliyin, NU Online berperan dengan membangun narasi yang sesuai dengan khittah NU dengan memperbanyak tulisan-tulisan yang memang berisi ajaran-ajaran keIslaman yang moderat. Misalnya peran NU Online dalam memberikan pemahaman kepada warga NU tentang dasar negara adalah dengan memproduksi tulisan-tulisan yang menjelaskan kenapa NU tidak menuntut

⁷ Islam dan Ancaman Radikalisme - Suara Muhammadiyah, diakses pada 2 September 2021, 11.45.

⁸ Wawancara dengan Peneliti, 29 Januari 2019, di Lippo Kemang Village, Jakarta Selatan.

negara Islam. Menurut Syafiq, ini bukan diskursus yang baru. “Hal-hal itu ditulis ulang untuk menunjukkan bahwa para sesepuh kita sudah pernah mendiskusikan soal ini. Kita bisa merujuk pandangan mereka kenapa mereka menerima Indonesia tidak menuntut negara Islam”, jelasnya. Lebih lanjut Syafiq mengatakan:

“Dalam konteks Piagam Jakarta kita juga menulis bahwa meskipun Kiai Wahid Hasyim pada awal-awal sempat punya aspirasi menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi kemudian dalam proses dinamika politik saya kira beliau juga menerima bahwa kalau umat Islam memaksakan begitu mungkin Indonesia tidak akan terbentuk seperti hari ini, apalagi waktu itu baru merdeka. Hal-hal seperti itu kita tulis agar warga NU paham atas sejarah yang pernah dilalui oleh para sesepuh kita. Belum lagi tulisan-tulisan dan argumen Gus Dur yang banyak sekali menyatakan bahwa Negara Indonesia itu sudah islami, demokrasi itu juga islami karena semangatnya musyawarah sementara ada ayat-ayat yang menyerukan untuk musyawarah”⁹.

Dalam menyikapi isu-isu radikalisme, di NU Online relatif tidak ada perbedaan pandangan. Semua hampir sepakat bahwa memang ekremisme keagamaan tidak dibenarkan. Karena memang di NU tidak ada. Siapapun yang benar-benar mempelajari sejarah keilmuan NU, sejarah politik NU, sejarah sosial NU, dan sejarah keagamaan NU tidak akan ada perbedaan pandangan dan bersepakat mengenai radikalisme ini. Maka dari itu, menurut Syafiq Ali, Direktur NU Online, dalam menyikapi isu-isu radikalisme, NU Online juga menyuarakan pemahaman NU mengenai radikalisme meskipun PBNU tidak pernah mempunyai *guideline* terhadap NU online. Para redaktur NU online relatif independen dalam memutuskan berdasarkan pada *fikrah Nahdliyah* dan keputusan-keputusan organisasi sepanjang sejarahnya, baik mengenai Pancasila, jihad, toleransi, dan dalam memandang non-muslim.

Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa intoleransi dan kekerasan atas nama agama yang menguat, Syafiq menjelaskan bahwa NU online cukup aktif *menchallenge* gagasan radikal ini. Apalagi banyak redaktur NU online yang dari dulu menjadi santri-santri Gus Dur. Mereka adalah

⁹ Wawancara dengan Peneliti, 29 Januari 2019, di Lippo Kemang Village, Jakarta Selatan.

generasi santri Ciganjur, mahasiswa-mahasiswa yang mondok di Ciganjur. Jadi frame Gus Dur-iannya yang menempatkan manusia itu setara apapun agamanya karena dia warga negara Indonesia itu sangat kuat.

Mengenai peran dan fungsi NU Online sebagai kontra-diskursus radikalisme, Syafiq Ali, Redaktur NU Online, menjelaskan bahwa perhatian utama NU online bukan untuk memerangi radikalisme. Konten NU online lebih pada bagaimana membuat ajaran-ajaran NU tetap dipeluk oleh mayoritas Muslim Indonesia. “Kalau ajaran atau tafsir ke-Islaman atau ke-NU-an itu dipeluk oleh mayoritas muslim Indonesia insyaallah muslimnya tidak akan menjadi radikal. Karena NU itu pada dasarnya *tawasuth*, moderat, toleran, menerima Pancasila dalam konteks politik ideologi negara, tidak akan mendukung ISIS, atau bentuk khalifah apapun, bahkan syariat Islam saja tidak NU tidak mendukung”, jelas Syafiq. Lebih lanjut mengenai hal ini Syafiq Ali mengatakan:

“Perhatian utama NU Online dalamewartakan pandangan ke-Islaman Nahdliyah atau Aswaja ini tetap dirujuk atau dipeluk oleh mayoritas muslim, maka dengan sendirinya akan bisa menekan radikalisme di Indonesia. Apalagi kemudian, seiring NU online juga banyak dibaca oleh kalangan non-NU, dibaca bukan saja oleh kalangan yang ada di pedesaan tapi juga di urban yang bersentuhan dengan ide-ide transnasional, ide-ide radikal. Bahkan keberadaan NU Online itu bukan untuk mengkonter radikalisme. Tetapi untukewartakan ideologi keagamaan kita sendiri, pandangan keagamaan kita sendiri, tafsir keagamaan kita sendiri, karena dengan itu kita percaya bisa menekan derajat radikalisme”¹⁰.

Dalam upaya kontra-diskursus radikalisme, NU Online merepresentasikannya dengan memperbanyak tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang konsep-konsep ke-Islaman yang terkait dengan radikalisme. Misalnya mengenai jihad, khilafah, pemimpin non-muslim, mayotirani Islam, dan mengenai tidak boleh menyerupai orang non-muslim dan seterusnya. “NU online masuk ke isu-isu yang memang menjadi diskursus banyak orang, terutama diskursusnya orang-orang di luar NU. Karena pada dasarnya sebagian besar orang NU tidak begitu

¹⁰ Wawancara dengan Peneliti, 29 Januari 2019, di Lippo Kemang Village, Jakarta Selatan.

terpengaruh dengan diskursus-diskursus itu. Kalau kita cari tidak ada kiai NU yang setuju khilafah Islamiyah atau ISIS”, jelas Syafiq.

NU Online memposisikan kelompok-kelompok muslim radikal dalam relasinya dengan warga NU di mana sebagian besar warga NU tidak akan terpengaruh dengan diskursus radikalisme, karena NU bukan kelompok yang paling rentan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan radikalisme. Menurut Syafiq, di NU mungkin ada kelompok konservatif yang sedikit banyak bisa terpengaruh, tetapi NU juga memiliki pagar sosial yang juga sangat kuat. Ketika ada orang lain terpengaruh dia tetap bisa melihat tokoh yang dia kagumi sikapnya bagaimana, dia tidak akan mengambil keputusan sendiri, tapi mengikuti tokoh atau kiai yang dia kagumi. Lebih lanjut Syafiq Ali menjelaskan mengenai pagar sosial radikalisme warga NU berikut:

“Paternalisme NU itu di satu sisi menjadi pagar sosial agar orang-orang NU tidak tiba-tiba bergabung sendiri ke sana (kelompok radikal). Justru yang urban, yang seringkali mengambil keputusan secara independen itu yang mengalami tantangan yang lebih besar karena tidak ada pagar sosialnya. Itu yang akhirnya NU online juga masuk ke situ agar bagaimana gagasan-gagasan ekstrim dan radikal itu tidak makin menguat di Indonesia. Sehingga teman-teman banyak sekali yang menulis tentang jihad, khilafah, formalitas syariat Islam, teks piagam Jakarta, apapun yang selama ini menjadi titik debat, titik konflik beragam ideologi dunia yang berbasis Islam ini”¹¹.

b) Analisis Konsumsi Teks Kontra-Diskursus Radikalisme

Konsumsi teks suaramuhammadiyah.id. Dalam produksi teks, suaramuhammadiyah.id memproduksi teks mengenai kontra-diskursus radikalisme dengan merepresentasikan isu Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (Negara Kesatuan dan Kesaksian), dan isu mengenai jihad sebagai *jihad lil-muwajahah* (berjuang menciptakan sesuatu yang unggul). Dalam konsumsi teks, akan dikaji bagaimana produksi teks yang diproduksi oleh suaramuhammadiyah.id mengenai diskursus radikalisme

¹¹ Wawancara dengan Peneliti, 29 Januari 2019, di Lippo Kemang Village, Jakarta Selatan.

dikonsumsi, dimaknai, dan dipahami oleh warga Muhammadiyah. Maka dari itu, di sini akan dikemukakan pandangan-pandangan warga atau tokoh Muhammadiyah mengenai kontra-diskursus radikalisme dalam isu dasar negara dan jihad.

Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, menurut Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, bahwa bentuk negara pilihan Muhammadiyah sudah jelas, yakni lebih mengutamakan masyarakat Islam, bukan negara Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah negara Indonesia dengan dasar Pancasila merupakan negara yang Islami, artinya negara yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam walaupun Indonesia bukan negara yang dibentuk berdasarkan agama Islam¹².

Pancasila sebagai dasar negara (Negara Pancasila) juga disepakati oleh pengurus sekaligus aktivis dan warga Muhammadiyah lainnya. Menurut Husnan Nurjuman, Wakil Sekretaris Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP. Muhammadiyah, Pancasila adalah suatu pilihan konsensus atau kesepakatan para pendiri NKRI, yang kelompok Islam merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Di antara kelompok Islam tersebut ada juga para tokoh Muhammadiyah. Sebagai anggota kelompok masyarakat yang perwakilannya turut menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, maka seharusnya semua orang yang kelompoknya terwakili dalam kesepakatan itu, berada dalam posisi menerima Pancasila sebagai dasar negara¹³.

Negara Pancasila sebagai konsensus juga disetujui oleh Pradana Boy ZTF, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Timur. Menurut Pradana Boy, bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebenarnya sudah final. Tak perlu diperdebatkan lagi, karena Pancasila merupakan hasil konsensus nasional bangsa Indonesia, dan konsensus itu hanya tercapai setelah melalui proses yang panjang dan tidak mudah¹⁴. Sedangkan Makmun

¹² Wawancara dengan Peneliti, 16 November 2018, di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

¹³ Wawancara dengan Peneliti, 12 Maret 2020, melalui e-mail.

¹⁴ Wawancara dengan Peneliti, 24 Maret 2020, melalui e-mail.

Murod, Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LKHP) PP. Muhammadiyah, memandang bahwa Pancasila merupakan ideologi tengahan yang terbaik. “Pancasila adalah bentuk ideologi tengahan, hasil dialektika panjang antara Islam dan Negara. Pancasila merupakan ideologi tengahan antara Kapitalisme dengan Komunisme, antara teokratik dengan sekularisme. Sebagai Negara tengahan dan hasil dialektika, saya menilai Pancasila sebagai bentuk ideologi terbaik”, jelas Makmun¹⁵.

Berkaitan dengan konsumsi teks mengenai Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, menurut Husnan Nurjuman penafsiran Muhammadiyah tersebut merupakan suatu pernyataan yang menegaskan posisi Muhammadiyah setelah berbagai peristiwa dan polemik yang mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Panafsiran Muhammadiyah tentang Pancasila sebagai rumah perjanjian dan rumah pembuktian menjelaskan paham keagamaan Muhammadiyah yang mengutamakan pengamalan substansi ajaran Islam dalam aksi-aksi sosial kemanusiaan daripada pengutamaan simbol¹⁶.

Menurut Pradana Boy, penafsiran Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, menjadi bukti komitmen kuat Muhammadiyah untuk menjaga negara Indonesia. Itu juga merupakan penegasan bahwa Muhammadiyah tidak ingin mempersoalkan lagi bentuk negara yang tepat bagi Indonesia¹⁷. Dari sudut pandang lainnya, Makmun Murod mengatakan:

“Tafsiran Muhammadiyah ini sangat proporsional, dan tidak berlebihan. Muhammadiyah organisasi berkemajuan, tak suka berbicara yang berbau jargon misalnya Pancasila “harga mati”. Ini sangat berlebihan. Muhammadiyah lebih suka menyebut sebagai Negara “konsensus” dan “persaksian” yang membutuhkan “pembuktian” dengan kerja-kerja nyata di masyarakat”¹⁸.

Sedangkan konsumsi teks mengenai jihad, pandangan warga dan tokoh-tokoh Muhammadiyah secara umum adalah bersungguh-sungguh di

¹⁵ Wawancara dengan Peneliti, 25 Maret 2020, melalui e-mail.

¹⁶ Wawancara dengan Peneliti, 12 Maret 2020, melalui e-mail.

¹⁷ Wawancara dengan Peneliti, 24 Maret 2020, melalui e-mail.

¹⁸ Wawancara dengan Peneliti, 25 Maret 2020, melalui e-mail.

jalan Allah Swt. dan menolak jihad dalam pengertian peperangan. Seperti pandangan Husnan Nurjuman, bahwa jihad tidak melulu dimaknai sebagai peperangan secara fisik melawan orang kafir (berbeda agama) atau orang-orang yang munafik, jihad harus dipahami sebagai upaya secara sungguh-sungguh. Secara bahasa, jihad adalah sungguh-sungguh dalam hal apapun, terutama adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam¹⁹. Begitu juga pandangan Pradana Boy yang memahami jihad pada dasarnya berarti berusaha keras, tekun bekerja, berjuang dan mempertahankan. Lebih jauh, jihad adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap perbuatan baik. Dalam konteks ini, makna jihad sangat luas²⁰.

Sebagai usaha sungguh-sungguh di jalan Allah, maka makna jihad menjadi sangat luas, setiap usaha yang sungguh-sungguh di jalan Allah atau niat semata mencari ridha Allah adalah jihad. Bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan orangtua itu jihad *fii sabilillah*. Menjalankan tugas sebagai rektor, dekan, presiden, menteri dan sebagainya dengan niat sungguh untuk wujudkan kebaikan itu jihad. Jadi makna jihad menjadi sangat luas. Menurut Makmun Murod²¹, jihad dalam Islam harus dikaitkan dengan *fii sabilillah*. Sebab kalau tidak ada kata *fii sabilillah* bisa berubah artinya. Makmun menjelaskan, “jihad kan artinya usaha sungguh-sungguh, maka harus dirangkai dengan *fii sabilillah*, usaha sungguh-sungguh di jalan Allah. Maling yang dikejar hansip dan lari sekencang-kencangnya agar tidak ditangkap itu juga jihad, tapi bukan *fii sabilillah*, tapi *fii sabilisyaitan*”.

Berkaitan dengan *jihad lil-muwajahah* pada dasarnya, seperti yang disampaikan oleh Pradana Boy, sejalan dengan makna dasar jihad dan sekaligus hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Terlebih belakangan ini, Muhammadiyah selalu mencitrakan diri sebagai

¹⁹ Wawancara dengan Peneliti, 12 Maret 2020, melalui e-mail.

²⁰ Wawancara dengan Peneliti, 24 Maret 2020, melalui e-mail.

²¹ Wawancara dengan Peneliti, 25 Maret 2020, melalui e-mail.

Islam Berkemajuan. Salah satu ciri utama kemajuan adalah mengajukan alternatif-alternatif²². Dari sudut yang lain, Makmun Murod menyatakan sangat bersepakat dengan tafsir Muhammadiyah terkait dengan jihad *lil-muwajahah*. Penafsiran ini untuk membedakan dengan pengertian jihad yang selama ini dipahami sekadar *bil lafdzi* (hanya sekadar di mulut), atau sebaliknya di titik ekstrem lainnya, jihad dipahami begitu menakutkan seperti meledakkan bom, dan sebagainya²³.

Mengenai jihad sebagai upaya sungguh-sungguh menciptakan suatu alternatif yang unggul, menurut pandangan Husnan Nurjuman:

“Perkembangan teknologi dan kehidupan dunia modern, perkembangan peradaban Barat yang di satu sisi juga melahirkan berbagai kegelisahan manusia modern seperti masalah lingkungan, eksploitasi manusia, kesenjangan ekonomi, bias gender dan masalah kemanusiaan lainnya. Lalu munculnya berbagai gerakan Islam dengan ideologi yang kontra-produktif dengan kemajuan umat, maka jihad yang dilakukan Muhammadiyah adalah memunculkan berbagai alternatif dengan keunggulan yang menandingi alternatif lain yang telah ada atau yang baru muncul”²⁴.

Konsumsi teks NU Online. Dalam produksi teks mengenai kontra-diskursus radikalisme, NU Online mempresentasikan isu Pancasila sebagai dasar negara dengan menampilkan Pancasila adalah islami, dan tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sedangkan mengenai jihad, NU Online merepresentasikannya secara lebih kontekstual dalam bentuk-bentuk jihad seperti jihad antikorupsi, antinarkoba, antihoaks, dan sebagainya. Dalam konsumsi teks, akan dikaji mengenai bagaimana pandangan-pandangan warga dan tokoh NU mengenai kontra-diskursus radikalisme baik tentang dasar negara Pancasila maupun tentang jihad kontekstual tersebut.

Pancasila sebagai dasar negara yang islami ditegaskan oleh Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Jenderal PBNU, bahwa Pancasila sila pertamanya adalah ketuhanan, nilai agama Islam, maka tidak dapat dibentur-benturkan

²² Wawancara dengan Peneliti, 24 Maret 2020, melalui e-mail.

²³ Wawancara dengan Peneliti, 25 Maret 2020, melalui e-mail.

²⁴ Wawancara dengan Peneliti, 12 Maret 2020, melalui e-mail.

dan tidak dihadap-hadapkan dengan Pancasila, tapi dicari kesesuaiannya²⁵. Pandangan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam juga ditegaskan oleh pengurus dan aktivis NU, Khamami Zada Wakil Ketua Lakpesdam PBNU. Menurut Khamami, dari sisi agama, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Bahkan, Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan teologis negara Indonesia. Sila pertama ini menjiwai empat sila lainnya, dan menjadi cermin bagi konsepsi tauhid seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Ikhlas²⁶. Sedangkan dalam pandangan Syafiq Ali, Sekretaris Lembaga Ta'lim wan-Nasyr PBNU, negara Pancasila sudah tepat untuk pilihan Indonesia yang sangat beragam kesejarahannya, agamanya, etnisnya, dan lingkungan geografisnya. Negara Pancasila memang sudah benar dan bisa membuat kita tetap bhinneka tunggal ika²⁷.

Dalam pandangan Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Alissa Wahid), Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU, Pancasila dalam bahasanya para Kiai itu sudah menjadi *mu'ahadah wathaniyah*, menjadi kesepakatan kebangsaan. Jadi semua bangsa atau komunitas memunyai hal-hal atau norma-norma yang disepakati. Norma itu bisa disepakati secara deliberatif, bisa juga tidak. Pancasila itu deliberatif, dilakukan secara resmi, di ruang-ruang dan kanal-kanal resmi dengan perwakilan yang dianggap representatif pada saat itu. Maka *binding*, mengikat. Jadi Pancasila sebagai kontrak sosial dilakukan secara deliberatif²⁸. Pancasila sebagai *mu'ahadah wathaniyah* sebagai kontrak sosial dan politik disampaikan oleh Syafiq Ali:

“Kita membutuhkan kontrak sosial dan politik yang menjamin semua merasa aman, setuju, *legitimate* sehingga kita bisa bersama-sama membangun sebuah kehidupan bersama yang baik. Maka dari itu, apa yang

²⁵ Wawancara dengan Peneliti, 29 Januari 2019, di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

²⁶ Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020, melalui e-mail.

²⁷ Wawancara dengan Peneliti, 16 April 2020.

²⁸ Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020, melalui telepon.

dirumuskan NU itu sudah tepat, yaitu *mu'ahadah wathaniyah* sebagai sistem sosial, sistem politik, dan kontrak sosial yang baik untuk memastikan semua orang yang hidup di bawah payung itu sama”.

Pancasila sebagai *mu'ahadah wathaniyah* (kesepakatan kebangsaan) dalam pandangan Khamami Zada karena Negara Pancasila adalah yang terbaik dari segala pilihan yang ada. Pancasila diyakini mampu menjadi perekat nasional atas segala perbedaan agama, etnik, dan ras. Pancasila adalah konsensus kebangsaan yang mempersatukan segala ideologi yang ada. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, mampu mewadahi semua kepentingan etnis, suku, dan golongan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)²⁹.

Mengenai konsumsi teks isu jihad, secara umum pandangan warga dan tokoh-tokoh NU adalah menolak pandangan jihad dalam bentuk kekerasan dan peperangan. Seperti pandangan Syafiq Ali, bahwa jihad dapat dimaknai secara luas dan kontekstual. Jihad adalah semangat untuk membela yang memang terancam, dan memperjuangkan apa yang dianggap benar oleh agama. “Ketika dijajah dan bangkit melawan, itu juga jihad. Selain itu, orang-orang yang sedang memperjuangkan kepentingan mereka yang lemah, menghadapi kekuatan yang hegemonik, yang menindas itu jihad. Dalam arti memperjuangkan tujuan dasar agama, syiar agama itu juga layak disebut jihad. Selama ini jihad selalu dipahami perang karena konteksnya yang diceritakan sejarah Nabi dan sahabat itu perang, padahal pada masa kehidupan Nabi perang hanya beberapa kali. Jadi jihad itu banyak konteksnya³⁰.

Maka dari itu, menurut Alissa Wahid, jihad adalah sebagai *mabadi' khaira ummah* (mengutamakan kemaslahatan umat). Menurut Alissa Wahid, membangun *khaira ummah* itu salah satu bentuk jihad. Jihadnya orang NU itu wujudnya bukan berperang tapi membangun *khaira ummah*. Jadi *mabadi' khaira ummah* itu sebagai salah satu bentuk jihad. Tidak

²⁹ Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020, melalui e-mail.

³⁰ Wawancara dengan Peneliti, 16 April 2020, melalui telepon.

sama dengan jihad, tapi bagian dari jihad³¹. Sedangkan dalam pandangan Khamami Zada, jihad sebagai *mabadi' khaira ummah* termasuk dalam kategori jihad yang non-fisik, yaitu mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, seperti mengajarkan ilmu, berdakwah, dan berbakti kepada orang tua. Penafsiran NU terhadap jihad seperti di atas adalah penafsiran yang progresif agar umat Islam tidak terjebak dalam pemahaman jihad sebagai perang saja³².

Berkaitan dengan konsep *mabadi' khaira ummah*, Alissa Wahid menjelaskan sebagai berikut:

“*Mabadi' khaira ummah* adalah langkah-langkah awal menuju *khaira ummah*, dalam konsep aslinya begitu. Kiai Mahfudz Shiddiq waktu itu mengatakan bahwa orang-orang NU itu harus memperbaiki dirinya supaya kapasitasnya lebih baik dan mempunyai daya saing. Itu konsep aslinya begitu. Supaya bisa menjadi *khaira ummah*, *mabadi'*nya bagaimana? Langkah-langkah pertamanya bagaimana? Itulah yang kemudian disebut sebagai gerakan *mabadi' khaira ummah*, yaitu menumbuhkan tiga karakter yang dianggap karakter yang penting untuk mewujudkan *khaira ummah* itu. Konsep *mabadi' khaira ummah* ini kemudian diperkuat menjadi lima poin, dan bukan hanya menjadi watak dan karakter seorang *Nahdliyin* saja tapi menjadi karakter dan kultur NU sebagai organisasi”³³.

Dengan demikian, produksi teks NU Online mengenai makna jihad yang direpresentasikan secara kontekstual dalam berbagai bentuk jihad seperti jihad melawan narkoba, jihad melawan hoaks, jihad melawan korupsi, dan bentuk-bentuk jihad lainnya merupakan aktualisasi dari jihad sebagai *mabadi' khaira ummah* ini.

3) Analisis Praktik Sosio-Kultural (Konteks)

Dimensi praktik sosio-kultural (*sociocultural practice*) merupakan dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks yang memengaruhi dimensi teks dan praktik wacana (produksi dan konsumsi teks). Dalam kajian ini, analisis praktik sosio-kultural (konteks) difokuskan pada fenomena

³¹ Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020, melalui telepon.

³² Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020, melalui e-mail.

³³ Wawancara dengan Peneliti, 17 Maret 2020, melalui telepon.

kemunculan atau kebangkitan kelompok-kelompok radikalisme muslim di Indonesia, dan fenomena radikalisme yang muncul di ranah publik baru (*new public sphere*) dan memanfaatkan media-media baru (*new media*) sebagai media diskursus radikalisme.

a) Radikalisme di Indonesia

Di Indonesia, gerakan radikalisme agama menemukan eksistensinya kembali setelah rezim Orde Baru Soeharto runtuh. Kemunculan mereka ditandai dengan ekspansi kaum salafi di beberapa kota di Indonesia dengan menampilkan atribut-atribut keislaman seperti jubah, serban, jenggot panjang, celana cingkrang, dan sejenisnya. Kelompok-kelompok muslim radikal di Indonesia dan Asia Tenggara adalah hasil dari transmisi ortodoksi Islam di Timur Tengah yang dibawa ke Indonesia oleh para pelajar dan guru yang pernah belajar di sana (Hasan, 2008).

Setidaknya terdapat lima kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok-kelompok muslim radikal di Indonesia pasca-Orde Baru, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad (JI), dan Front Pembela Islam (FPI) (van Bruinessen, 2002). Khusus HTI, meskipun wacana ideologis dan doktrin-doktrin yang ditawarkan bersifat radikal, tapi pendekatan atau pola gerakan yang mereka praktikkan di Indonesia tidak bersifat kekerasan (Mubarak, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok muslim radikal tidak serta merta adalah kelompok dengan kekerasan atau teroris, karena kekerasan dan teror adalah salah satu strategi saja untuk mencapai tujuan perubahan yang mereka inginkan (Azra, 2016).

Kebangkitan kelompok-kelompok muslim radikal pasca-Orde Baru ini menjadi titik balik kebangkitan kelompok-kelompok muslim konservatif (*conservative turn*) di Indonesia. *Conservative turn* ini ditandai dengan pengambilalihan terhadap kelompok-kelompok muslim *mainstream* di mana pemikiran-pemikiran liberal dan progresif di tubuh Muhammadiyah dan NU mulai ditolak, terutama ini terjadi pada muktamar

kedua organisasi Islam tersebut pada tahun 2005. Termasuk adanya kecenderungan di tubuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam beberapa dekade terakhir mulai menjadi lebih konservatif (Van Bruinessen, 2011, 2013).

Di tubuh Muhammadiyah, *conservative turn* mulai muncul pada masa kepemimpinan A. Syafi'i Maarif tahun 2000-2005, dan semakin menguat pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005. Hal itu ditandai dengan pengambilalihan kepemimpinan Muhammadiyah oleh kelompok-kelompok muslim konservatif, respon organisasi mengenai isu kepemimpinan perempuan, dan penyerangan terhadap Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) yang dianggap liberal (Burhani, 2013). *Conservative turn* yang paling jelas adalah pada tahun 2005, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa sekulerisme, pluralisme, dan liberalisasi agama (Sipilis) tidak sesuai dengan Islam. Fatwa ini dipercayai merupakan inspirasi dari kelompok-kelompok muslim radikal, dan didukung kelompok-kelompok muslim konservatif lainnya. Fatwa-fatwa MUI lainnya yang menandai *conservative turn* adalah mengutuk praktik doa antaragama, mengharamkan perkawinan berbeda agama, dan pelarangan terhadap Ahmadiyah (Ichwan, 2013).

Munculnya kelompok-kelompok muslim radikal pasca-Orde Baru dapat ditelusuri melalui dua akar. Pertama, dinamika politik tahun 1940-an yang melibatkan Masyumi dan Darul Islam (DI). Kedua, adanya jaringan Islam transnasional. Setelah sebagai partai politik Masyumi dibubarkan oleh Soekarno, dan Parmusi sebagai wadah baru partai Islam pengganti Masyumi pada masa Orde Baru banyak diintervensi oleh penguasa, maka tokoh-tokoh Masyumi kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Fokus gerakan DDII adalah dakwah terutama untuk melawan Kristenisasi di Indonesia, dan mereka menjalin hubungan baik dengan Saudi Arabia. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), yang pada

reformasi memiliki kedekatan dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Pada Pemilu 1999, pendukung Masyumi mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), tapi sebagian pendukung lainnya bergabung dengan Partai Golkar melalui jaringan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) (van Bruinessen, 2002).

Darul Islam (DI), dikenal sebagai kelompok pemberontak pada masa Soekarno, yang kemudian berhasil ditumpas. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, DI “dihidupkan” kembali oleh Ali Murtopo untuk menghadapi PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan nama “Komando Jihad”. Pada perkembangannya Komando Jihad ini berbalik melawan penguasa Orde Baru dengan tindakan-tindakan radikalnya seperti pengeboman Candi Borobudur dan BCA, serta demonstrasi Tanjung Priok yang menewaskan banyak orang Islam. Tokoh DI adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir, yang dianggap memiliki hubungan dengan Masyumi dan DDII. Abu Bakar Ba’asyir sekembalinya dari Malaysia kemudian mendirikan Jamaah Islamiyah yang berafiliasi kepada al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Pada Kongres Umat Islam di Yogyakarta tahun 2000, Abu Bakar Ba’asyir diangkat menjadi pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (van Bruinessen, 2002). Anggota DI kemudian menyebar ke dalam berbagai organisasi di antaranya DDII, Laskar Jihad, Komando jihad, dan JAT (Hadiz, 2016).

Akar kedua muslim radikal di Indonesia adalah pengaruh dari gerakan-gerakan Islam transnasional melalui masjid-masjid kampus di Indonesia pada awal tahun 1980. Pengaruh awal adalah dampak dari Revolusi Iran, yang menyebar melalui pemikiran intelektual muslim seperti Ali Syari’ati dan Muthari, terutama mengenai revolusi Islam, mempertahankan hak-hak kaum lemah dan tertindas, serta mengenai penafsiran baru atas teks al-Qur’an. Salah satu gerakan Islam kampus adalah gerakan Tarbiyah di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), yang kemudian menginspirasi gerakan serupa di berbagai kampus lain. Gerakan ini melakukan indoktrinasi terhadap anggotanya melalui

pendekatan *usrah*, salah satunya adalah menolak Pancasila. Mereka dipengaruhi pemikiran al-Maududi, dan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir, terutama dengan jargon *Muslim Brotherhood*. Pada masa reformasi kelompok ini merepresentasikan dirinya ke dalam Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta di MPR (van Bruinessen, 2002).

Kebangkitan kelompok-kelompok muslim radikal di Indonesia pasca Orde Baru ditandai dengan, pertama, munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai politik Islam yang mengikuti Pemilu pertama era reformasi, 7 Juni 1999. Kedua, kebangkitan kembali kelompok-kelompok muslim garis keras seperti FPI, MMI, dan Laskar Jihad. Ketiga, meningkatnya permintaan sejumlah daerah di Indonesia untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) syari'ah Islam. Keempat, meningkatnya popularitas media-media Islam garis keras, seperti Sabili dan Suara Hidayatullah (Salim & Azra, 2003). Di samping itu, Islam post-Soeharto jug ditandai dengan terlibatnya kelompok-kelompok muslim radikal pada berbagai konflik antar-agama di daerah-daerah di Indonesia, munculnya kelompok-kelompok jihadis yang mengobarkan perang dan kekerasan, dan munculnya tindakan terorisme yang menyerang berbagai tempat, hotel, pariwisata, dan gereja (Van Bruinessen, 2013).

Dalam konteks kontra-diskursus radikalisme, apa yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online mengenai isu dasar negara dan jihad merupakan respon atas situasi sosial-kultural dan politik yang berkembang kala itu. Pertama mengenai dasar negara, suaramuhammadiyah.id merepresentasikannya dengan diskursus Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Sedangkan NU Online mewacanakan Pancasila Islami, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Diskursus kedua media online resmi Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan kontra-diskursus terhadap gagasan pokok kelompok-kelompok muslim radikal

yang hendak mendirikan Negara Khilafah (*Khilafah Islamiyah*) dan menegakkan syariat Islam di Indonesia, dan tentu saja menolak demokrasi. Ide ini terutama dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) (Afrianty, 2012; Arif, 2018; Karman & Hamad, 2019). Gagasan pendirian negara Islam dan menegakkan syariat Islam di Indonesia juga didukung oleh kelompok-kelompok muslim yang berideologi radikal lainnya, di antaranya adalah MMI, JI, FPI dan PKS (van Bruinessen, 2002).

HTI dapat disebut sebagai pelopor gagasan pendirian Negara Khilafah di Indonesia. Hizbut Tahrir (HT) didirikan oleh Taqiyyudin an-Nabhani di Pakistan tahun 1953. Di Indonesia HT didirikan dan disebarkan oleh Abd. Rahman al-Baghdadi di Bogor antara tahun 1982-1983, yang kemudian dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendeklarasikan organisasinya setelah Orde Baru Soeharto tumbang, dengan menggelar “Konferensi Khilafah Islamiyah” di Jakarta, tahun 2000-an (Arif, 2018; Hasan, 2008). Pada akhir tahun 2000-an, HTI bersama-sama dengan kelompok-kelompok muslim radikal lainnya mengadakan Kongres Majelis Mujahidin I di Yogyakarta, yang kemudian memilih Abu Bakar Ba’asyir sebagai Amirul Mujahidin (Mubarak, 2007). Dalam kongres yang dihadiri oleh sejarahwan Deliar Noer, Kiai Alway Muhammad dari Madura, dan Hidayat Nur Wahid, Presiden Partai Keadilan ini fokus agendanya adalah menggagas penerapan syariat Islam di Indonesia dengan membentuk Negara Islam. Menurut van Bruinessen (2002), kongres ini dipandang sebagai reuni kelompok Darul Islam, yang pada masa Orde Baru merupakan penentang Soeharto.

Sebagai gerakan transnasional, HTI tidak pernah menjadi partai politik meskipun menggusung kepentingan politik. Gagasan utama HTI adalah mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan penerapan syariat Islam di Indonesia (Mubarak, 2007). Mereka yakin dengan konsep negara “khilafah” dan penerapan syariat Islam segala permasalahan yang ada di Indonesia dapat diatasi. Jadi tujuan HTI adalah mendirikan bentuk negara

Khilafah Islamiyah sebagai pengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menegakkan penerapan syariat Islam sebagai dasar negara untuk mengganti Pancasila. Meskipun dalam beberapa aspek tertentu kemunculan HTI dapat dianggap sebagai kebangkitan umat Islam karena pengaruhnya yang luas di kalangan kampus (Santoso & Sjuchro, 2019), gagasan mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia oleh HTI secara ideologis dikritik oleh Muhammadiyah sebagai gagasan ahistoris dan penuh dengan kontradiksi.

Kedua, mengenai isu jihad, suaramuhammadiyah.id merepresentasikan diskursus *jihad lil-muwajahah* (berjuang menciptakan suatu alternatif yang unggul) dalam berbagai bentuk seperti jihad konstitusi, jihad antikorupsi, jihad politik, dan sebagainya. Adapun NU Online mewacanakan jihad secara lebih kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini seperti jihad melawan narkoba, jihad melawan hoaks, jihad melawan korupsi, dan bentuk-bentuk jihad lainnya. Diskursus makna jihad yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online tersebut merupakan kontra-diskursus atas makna jihad sebagai tindakan kekerasan, peperangan, dan terorisme yang mengatasnamakan jihad dari kelompok-kelompok muslim radikal yang berafiliasi kepada al-Qaeda, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jamaah Islamiyah (JI), serta Laskar Jihad (LJ). Mereka memahami jihad sebagai tindakan terorisme dan perang melawan Amerika Serikat, Israel, dan Sekutu-sekutunya. Termasuk juga pemahaman kelompok muslim radikal lokal seperti Front Pembela Islam (FPI) yang memahami jihad sebagai perang untuk menghancurkan kemaksiatan.

Kelompok-kelompok muslim tersebut disebut radikal setidaknya karena dua hal, yaitu afiliasi gerakannya dan pemikiran atau pandangan dunianya. MMI dan JI, ditengarai kuat memiliki hubungan erat dengan al-Qaeda (Ali, 2014; Hasan, 2008; van Bruinessen, 2002). Menurut pandangan kelompok-kelompok muslim radikal ini, terutama al-Qaeda,

jihad dimaknai sebagai tindakan teror dan memerangi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Pemahaman al-Qaeda dan kelompok-kelompok muslim radikal mengenai jihad merupakan terorisme baru yang tidak mengenal istilah negosiasi (Roy, 2004). Pemahaman jihad ala al-Qaeda ini, yakni perang melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang kemudian menjadikan Islam menjadi fenomena global (Devji, 2005).

FPI dapat dianggap sebagai kelompok muslim radikal asli Indonesia, dideklarasikan di Ciputat, Jakarta Selatan tahun 1998. Tokoh terpenting FPI adalah Habib Rizieq Shihab. Secara doktrin keagamaan sebenarnya FPI ini relatif lebih moderat dibanding kelompok-kelompok muslim radikal yang memiliki afiliasi internasional. Namun dalam tindakannya, dengan paradigma “*amar ma'ruf nahi munkar*”, FPI sangat konfrontatif dan cenderung mengedepankan kekerasan dalam memberantas segala kemaksiatan. Jihad, dalam pandangan FPI adalah menghancurkan berbagai tempat kemaksiatan. Dalam konteks politik, FPI mengeluarkan fatwa politik pengharaman presiden perempuan pada pemilihan presiden 1999 (Mubarak, 2007). Selain itu, aksi-aksi demonstrasi juga dilakukan oleh FPI dalam kasus-kasus seperti penerapan kembali Piagam Jakarta, menduduki kantor Komnas HAM menuntut penyelidikan kembali peristiwa Tanjung Priok, dan demonstrasi menentang Amerika Serikat karena menyerang Afghanistan (van Bruinessen, 2002).

b) Radikalisme di Ranah Publik Baru

Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat, maka diskursus radikalisme pun bergeser dari ranah publik konvensional, seperti ruang-ruang publik di kelas, seminar, dan media massa konvensional ke ranah publik baru, yang berbasis jaringan internet dalam bentuk media online, media baru, dan media sosial. Konsep ruang publik (*public sphere*) digagas oleh tokoh Teori Kritis Jurgen Habermas yang merupakan jaringan untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan. Ranah

publik berkaitan dengan opini publik, istilah yang mengacu fungsi kritik dan kontrol oleh publik. Berkaitan dengan fungsi opini publik, ranah publik sebagai ranah yang menghubungkan antara negara dan masyarakat, ranah di mana publik sebagai sarana opini publik (Habermas, 2009). Ranah publik merupakan bagian mendasar dari organisasi sosial-politik karena ia adalah ranah di mana orang-orang datang bersama sebagai warga negara dan mengartikulasikan pandangan-pandangan bebasnya untuk mempengaruhi institusi politik di masyarakat (Castells, 2010).

Dalam perkembangannya, konsep ranah publik diperluas pemahamannya dengan istilah atau konsep ranah publik baru (*the new public sphere*). Terdapat dua hal yang membedakan konsep ranah publik dengan ranah publik baru. Pertama, berkaitan dengan sistem komunikasi yang terlibat di dalamnya. Ranah publik baru digerakkan oleh sistem komunikasi multimodal, di mana internet dan jaringan komunikasi horizontal memainkan peran yang menentukan. Terdapat pergantian dari ranah publik yang berpijak pada lembaga-lembaga nasional dari masyarakat dengan batas-batas teritorial ke arah ranah publik yang berpangkal pada sistem media. Sistem media ini disebut sebagai *mass self-communication*, yakni jaringan komunikasi yang menghubungkan banyak ke banyak (*many to many*) dalam mengirim dan menerima pesan-pesan (Castells, 2008, 2010).

Kedua, berkaitan dengan partisipan atau aktor yang terlibat dalam pembentukan demokratisasi publik, yaitu negara, lembaga antar-pemerintah, dan masyarakat sipil. Ranah publik global baru dibangun melalui sistem komunikasi dan jaringan internet, seperti YouTube, MySpace, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Maka dari itu penting bagi para aktor tersebut untuk saling menjalin hubungan dalam semacam debat publik dalam ranah publik global. Dengan demikian, konsolidasi ranah publik berbasis komunikasi menjadi salah satu kunci dengan mana negara dan lembaga-lembaga internasional dapat terikat dalam sebuah proyek masyarakat sipil global. Opini publik melalui media global dan

jaringan internet merupakan bentuk yang paling efektif dalam mendorong partisipasi politik dalam skala global, dengan koneksi sinergis antara pemerintah berbasis lembaga internasional dan masyarakat sipil global (Castells, 2008, 2010).

Radikalisme sebagai salah satu isu global tentu menjadi perhatian banyak kalangan, baik negara, lembaga antar-pemerintah, dan masyarakat sipil. Berkaitan dengan diskursus radikalisme di ranah publik baru, maka dapat dilihat bagaimana isu radikalisme ini dibicarakan dan dikonstruksi maknanya oleh berbagai kalangan di ranah publik baru, seperti bentuk-bentuk media baru yang berbasis internet. Salah satu alasan mengapa radikalisme menjadi isu global adalah karena peran media-media baru tersebut. Kelompok-kelompok muslim fundamentalis misalnya, menggunakan internet untuk mengartikulasikan identitas global dan lokal mereka, yang mencakup politik, komersial, ideologis, bahasa, dan komunikasi atau interaksi menggunakan website. Al-Qaeda misalnya, jaringan gerakannya dioperasikan melalui worldwide, dengan berbagai liputan agenda politik mereka (Khatib, 2019). Al-Qaeda juga seringkali menggunakan *al-Jazeera*, sebuah jaringan televisi muslim independent, sebagai alternatif CNN (Castells, 2004).

Pada konteks Indonesia, media-media online telah lama dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok muslim radikal sebagai ladang penyemaian benih-benih pemahaman radikal melalui diskursus yang mereka munculkan. Kelompok-kelompok muslim radikal seperti Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggunakan media-media online mereka miliki yakni situs JAT (ansharuttauhid.com), situs MMI (majelismujahidin.com), dan situs HTI (hizbut-tahrir.or.id) untuk mengkonstruksi pandangan-pandangan mereka mengenai isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi seperti isu HAM; kebebasan beragama, kelompok minoritas; dan kebebasan berekspresi (Karman, 2015).

Bahkan dalam perkembangan, kelompok-kelompok muslim radikal juga menggunakan media-media sosial seperti Youtube, Twitter, Instagram, dan sebagainya sebagai media penyebaran pandangan-pandangan radikal mereka (Muthohirin, 2015). Terdapat peran yang sangat signifikan dari media-media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai arena baru penyemaian dan propaganda kelompok-kelompok muslim radikal seperti HTI, Harakah Tarbiyah dan Jamaah Salafi. Sasarannya adalah kaum muda yang memang dekat dengan media-media sosial sehingga pesan-pesan radikalisme lebih mudah diterima (Muthohirin, 2015). Termasuk menyasar kalangan mahasiswa melalui organisasi-organisasi mahasiswa di kampus-kampus Islam, seperti Lembaga Dakwah Kampus (Afrianty, 2012).

Adanya konteks sosio-kultural politik, yakni bahaya laten paham radikalisme agama dan meningkatnya peran media online dan media sosial, serta media-media berbasis jaringan internet lainnya sebagai media baru dalam penyebarluasan paham radikalisme, perlu diantisipasi dan ditandingi dengan peningkatan peran media-media serupa dari pemerintah dan organisasi-organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU. Melalui suaramuhammadiyah.id dan NU Online, kontra-diskursus radikalisme dapat dilakukan dengan menampilkan penafsiran-penafsiran terhadap isu-isu radikalisme seperti dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim secara lebih kontekstual di ranah publik baru.

c. Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dikaji keterkaitan antara hasil penelitian dan teori yang dipergunakan. Pada bagian ini pembahasan difokuskan pada pertama, kontra-diskursus radikalisme yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai upaya perlawanan radikalisme, dan kedua, berkaitan dengan peran dan fungsi media baru, salah satu bentuknya adalah media online dalam kontra-diskursus radikalisme, terutama dalam isu dasar negara dan jihad.

1) Diskursus dan Kontra-Diskursus Radikalisme di Media Online

Istilah diskursus atau wacana dipopulerkan oleh Michel Foucault. Diskursus merupakan keseluruhan domain (bidang) yang mana bahasa digunakan dengan pola-pola tertentu. Diskursus dapat diartikan sebagai keseluruhan wilayah konseptual di mana pengetahuan diciptakan atau dibentuk, dan diproduksi (Lubis, 2014). Diskursus dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap teks, adalah setiap bahasa yang dibakukan lewat tulisan. Maka, diskursus selalu berkaitan dengan bahasa yang digunakan. Bahasa dalam diskursus dianggap sebagai peristiwa (*event*), yakni bahasa yang membicarakan sesuatu (Ricoeur, 2006). Jadi, diskursus adalah bahasa ketika ia digunakan untuk berkomunikasi (Permata, 2013).

Sedangkan kontra-diskursus, dalam pandangan Foucault berkaitan dengan kelompok yang sebelumnya tidak bersuara kemudian mulai mengartikulasikan keinginan mereka untuk melawan dominasi wacana otoritatif yang berlaku (Moussa & Scapp, 1996). Kontra-diskursus adalah semacam perlawanan dengan memproduksi diskursus tandingan. Tetapi dalam kontra-diskursus apa yang digambarkan dan diinterpretasikan berbeda dengan apa yang digambarkan dan diinterpretasikan dalam diskursus. Sebagai contoh, istilah *Occidentalism* sebagai kontra-diskursus istilah *orientalism*, atau dalam posisi biner seperti *West-East*, *Self-Other*, *Oppressed-Oppressor* (Sorensen & Chen, 1996). Kontra-diskursus juga dapat berbentuk misalnya istilah *post-colonial* sebagai kontra-diskursus kolonialisme dan imperialisme (Tiffin, 1987).

Dalam konteks penelitian ini, diskursus radikalisme ditampilkan oleh media-media online yang berafiliasi kepada kelompok-kelompok muslim radikal seperti Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Melalui media-media online yang dimiliki, mereka mengontruksi diskursus mengenai isu-isu seperti sistem pemerintahan, jihad, dan toleransi sesuai dengan pandangan dan kepentingan mereka. Pada isu sistem pemerintahan misalnya, mereka menolak sistem demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila dan menggagas sistem

pemerintahan khilafah yang berasaskan syariat Islam. Begitu pula pada isu jihad, dalam pandangan mereka jihad adalah memerangi orang-orang kafir sebagai musuh Islam dengan kekerasan dan terorisme. Termasuk mengenai toleransi yang dipandang sebagai akal-akalan kelompok-kelompok non-muslim agar dapat menyingkirkan umat Islam (Afrianty, 2012; Karman, 2015; Muthohirin, 2015).

Diskursus radikalisme yang ditampilkan media-media online kelompok-kelompok muslim radikal mengenai berbagai isu tersebut itulah yang kemudian ditandingi dan dilawan melalui kontra-diskursus radikalisme oleh media-media online yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Islam moderat Muhammadiyah dan NU, yakni suaramuhammadiyah.id dan NU Online. Kontra-diskursus, sebagaimana dijelaskan, adalah semacam perlawanan dengan memproduksi diskursus tandingan untuk melawan dominasi wacana otoritatif yang berlaku (Moussa & Scapp, 1996). Maka sebagai kontra-diskursus radikalisme, suaramuhammadiyah.id dan NU Online menampilkan diskursus tandingan dalam bentuk atau makna yang berbeda mengenai sistem pemerintahan atau dasar negara, dan jihad.

Mengenai isu sistem pemerintahan atau dasar negara, suaramuhammadiyah.id menampilkan diskursus Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (Negara Kesatuan dan Kesepakatan) sebagai kontra-diskursus Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*), dan *jihad lil-muwajahah* (berjuang sungguh-sungguh menciptakan suatu alternatif yang unggul) sebagai kontra-diskursus jihad kekerasan dan peperangan. Sedangkan NU Online merepresentasikan diskursus dasar negara dengan Pancasila adalah islami, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, serta menampilkan makna jihad dalam diskursus yang lebih kontekstual seperti jihad melawan korupsi, anti-narkoba, jihad melawan hoaks, dan sejenisnya sebagai kontra-diskursus makna jihad kekerasan dan terorisme.

Secara lebih mendalam, kontra-diskursus radikalisme yang ditampilkan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online dapat dipandang juga sebagai bentuk kontra-hegemoni atas pemahaman isu-isu radikalisme yang selama ini

dianggap dominan. Selama ini kelompok-kelompok muslim radikal dilihat sebagai kelompok dominan meski tidak pada wujud kontrol politik dan ekonomi, tapi lebih pada kemampuan mereka mengatur cara-cara yang mereka miliki dalam memandang dunia untuk diikuti dan ditanamkan kepada kelompok-kelompok lain. Sehingga pandangan mereka dianggap sebagai hal yang “lumrah” dan “alamiah”: bahwa sistem pemerintahan atau dasar negara adalah Negara Islam, bukan Pancasila. Jihad adalah perang dan kekerasan, bahkan teror terhadap kelompok-kelompok lain. Termasuk pandangan bahwa non-muslim adalah kaum kafir yang lumrahnya dimusuhi dan diperangi.

Istilah kontra-hegemoni juga lahir dari pemikiran Gramsci, yakni semacam perang posisi atau kultural dalam jangka panjang. Dalam proses perang posisi ini peran intelektual organik sangat menentukan, karena hegemoni sebagian besar diperoleh dan dimantapkan melalui pendidikan (Magnis-Suseno, 2003). Meskipun pada tataran diskursus, apa yang ditampilkan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online merupakan upaya atau tindakan penyadaran atau pembebasan dari pemahaman radikalisme yang dianggap tidak sesuai. Dengan merepresentasikan diskursus negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* dan Pancasila itu islami, serta *jihad lil-muwajahah* dan jihad yang kontekstual, suaramuhammadiyah.id dan NU Online berupaya melakukan kontra-hegemoni terhadap diskursus radikalisme yang selama ini dianggap dominan dan hegemonik, bahwa sistem pemerintahan di Indonesia yang ideal adalah Negara Islam dengan Syariat Islam, dan jihad adalah perang melawan orang kafir musuh-musuh Islam.

Kontra-hegemoni oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online terhadap hegemoni pemahaman radikalisme mengenai dasar negara dan jihad dilakukan dengan terus memproduksi pemahaman atau penafsiran baru mengenai isu-isu utama radikalisme, yaitu mengenai bentuk negara Pancasila dan jihad, serta toleransi terhadap non-muslim. Pemahaman mengenai isu-isu radikalisme di atas harus terus ditanamkan ke dalam benak masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah dan NU sebagai kontra-diskursus radikalisme melalui online suaramuhammadiyah.id dan NU Online.

2) Peran Media Baru dalam Kontra-Diskursus Radikalisme

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai media baru dalam melawan diskursus radikalisme, terutama mengenai isu dasar negara Pancasila dan jihad. Melalui berita-berita dan artikel-artikelnya yang ditampilkan selama tahun 2015-2020, kedua media resmi organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, melakukan kontra-diskursus radikalisme dengan merepresentasikan isu mengenai dasar negara Pancasila dan jihad dengan perseptif atau sudut pandang yang berbeda. Mengenai isu dasar negara Pancasila, suaramuhammadiyah.id menampilkan diskursus Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (Negara Kesatuan dan Kesepakatan) sebagai kontra-diskursus Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*). Sedangkan mengenai jihad, suaramuhammadiyah.id merepresentasikan *jihad lil-muwajahah* (berjuang sungguh-sungguh menciptakan suatu alternatif yang unggul). Di lain pihak, mengenai dasar negara Pancasila NU Online merepresentasikan diskursus dasar negara dengan Pancasila islami, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Adapun mengenai jihad, NU Online lebih menampilkan makna jihad dalam diskursus yang lebih kontekstual seperti jihad melawan korupsi, anti-narkoba, jihad melawan hoaks, dan sejenisnya.

Diskursus mengenai isu dasar negara Pancasila dan jihad yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online di atas, berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang ditampilkan oleh media-media online yang berafiliasi kepada kelompok-kelompok muslim radikal. Media-media online kelompok ini menampilkan isu sistem pemerintahan dan dasar negara dengan menolak demokrasi dan Pancasila, serta memaknai jihad sebagai perang terhadap kaum kafir musuh-musuh Islam. Pada titik inilah terjadi diskursus dan kontra-diskursus antara media online kelompok-kelompok muslim moderat dan kelompok-kelompok muslim radikal mengenai isu sistem pemerintahan dan dasar negara, serta isu jihad. Di sini media online menjadi arena kontestasi atau pertarungan memperebutkan

makna yang sesungguhnya dari dua kelompok muslim yang berbeda kepentingannya tentang dasar negara dan jihad.

Maka dari itu, dalam konteks kontra-diskursus radikalisme, apa dilakukan suaramuhammadiyah.id dan NU Online melengkapi fungsi dan peran media online sebagai media baru (*new media*) bagi masyarakat. Media baru adalah media yang berbasis pada internet. Teknologi yang menyediakan konvergensi, jaringan digital, jangkauan global, interaktifitas, komunikasi many-to-many, dan bentuk-bentuk media yang seseorang dapat menjadi produser sekaligus konsumen (Flew, 2005). Media baru sebenarnya mengacu pada perubahan-perubahan yang luas dalam produksi media, distribusi, dan penggunaannya, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi dan konvergensi (Flew, 2005; McQuail, 2010). Media baru diidentikkan dengan digital, interaktif, hipertekstual, virtual, jaringan, dan simulasi (Lister et al., 2009). Karakteristik media baru yang membedakannya dengan media lama atau konvensional adalah interaktifitas, presentasi sosial, pengayaan media, otonomi, penuh kesenangan, privasi, dan personalisasi (McQuail, 2010).

Fungsi media baru sesuai dengan karakteristiknya di antaranya sebagai media interaksi, ekspresi dan identitas sosial, mendapatkan kesenangan, dan lain sebagainya. Namun selain itu, fungsi media baru adalah untuk meningkatkan partisipasi politik dan demokratisasi. Media baru menjadi semacam forum baru untuk mengembangkan tujuan dan opini kelompok-kelompok kepentingan, menyediakan ruang dialog antarkelompok, termasuk antara politisi dengan warga negara. Selanjutnya, media-media baru akhirnya dapat menciptakan demokrasi deliberatif dalam bentuk interaksi dan pertukaran gagasan-gagasan di ranah publik (McQuail, 2010).

Suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai salah satu bentuk media baru dalam konteks ini telah mengambil peran dan memfungsikan posisi mereka dalam partisipasi politik dan demokrasi publik. Partisipasi politik oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online diwujudkan dalam bentuk menyuarakan kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat mengenai sistem

pemerintahan dan dasar negara Pancasila, serta jihad sebagai ajaran Islam. Sedangkan demokrasi deliberatif dilakukan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online dengan merepresentasikan gagasan-gagasan Muhammadiyah dan NU mengenai sistem pemerintahan dan dasar negara Pancasila, serta jihad untuk dikontestasikan dengan gagasan-gagasan serupa dari kelompok-kelompok lainnya, terutama kelompok-kelompok muslim radikal di ranah publik baru.

Di samping itu, dengan melakukan kontra-diskursus radikalisme, suaramuhammadiyah.id dan NU Online menunjukkan peran dan fungsi kritis media online. Kedua media online milik Muhammadiyah dan NU ini tidak hanya berfungsi secara fungsional sebagai media informasi bagi warga Muhammadiyah dan NU, atau sekadar sebagai media yang menyuarakan pandangan, dan membawa ajaran-ajaran kemuhammadiyah dan Aswaja (Saputra & Nazim, 2017; Sukmono & Junaedi, 2020). Tetapi lebih jauh lagi, suaramuhammadiyah.id dan NU Online juga melakukan kritik ideologi terhadap radikalisme agama sebagai sebuah paham atau ideologi yang harus ditolak di Indonesia, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil-alamin*.

Dalam pandangan suaramuhammadiyah.id gagasan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah di Indonesia adalah gagasan yang ahistoris dan utopis, begitu juga mengenai jihad sebagai perang terhadap kaum kafir tidak lagi relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Sedangkan dalam pandangan NU Online, Negara Khilafah yang digagas oleh kelompok-kelompok muslim radikal justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, maka tidak cocok diterapkan di Indonesia. Apalagi dalam pandangan NU Online Pancasila itu sangat Islam jadi tidak diperlukan Negara Islam lagi di Indonesia. Demikian pula dengan jihad sebagai perang melawan musuh-musuh Islam dengan melakukan pengeboman dan penyerangan gereja, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan perdamaian.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan hasil analisis teks mengenai kontra-diskursus radikalisme di *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online menunjukkan bahwa mengenai isu dasar negara Pancasila, *suaramuhammadiyah* merepresentasikan Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Sedangkan NU Online merepresentasikan Pancasila itu islami, dan tidak ada pertentangan Islam dengan Pancasila. Representasi kedua media online resmi Muhammadiyah dan NU ini sebagai kontra-diskursus radikalisme mengenai gagasan mendirikan Negara Islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia yang diusung oleh kelompok-kelompok muslim radikal. Selanjutnya mengenai isu jihad, yang mana *suaramuhammadiyah.id* merepresentasikan isu jihad sebagai *jihad lil-muwajahah* (berjuang menciptakan sesuatu yang unggul). Adapun NU Online merepresentasikan jihad secara lebih kontekstual, seperti jihad melawan korupsi, melawan narkoba, melawan hoaks, dan lain sebagainya.

Representasi *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online ini merupakan kontra-diskursus radikalisme mengenai jihad sebagai kekerasan, perang, dan terorisme dari kelompok-kelompok muslim radikal. Kontra-diskursus radikalisme mengenai dasar negara dan jihad oleh *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online tidak lepas dari identitas kedua media online resmi organisasi Islam yakni Muhammadiyah dan NU yang moderat. Sebagai media yang menyuarakan kepentingan dan paham moderat, *suaramuhammadiyah.id* dan NU Online memiliki relasi yang bertolak belakang dengan kelompok-kelompok muslim radikal dalam memaknai isu dasar negara dan jihad.

Kedua, berdasarkan analisis praktik diskursus dalam produksi teks mengenai kontra-diskursus radikalisme, *suaramuhammadiyah.id* tidak secara langsung melawan radikalisme, tapi lebih dengan mengedepankan moderasi. Jalan moderasi sebagai kontra-diskursus radikalisme yang direpresentasikan

oleh suaramuhammadiyah.id mengikuti sikap organisasi Muhammadiyah dan pandangan-pandangan tokoh Muhammadiyah yang ditampilkan dalam berita-berita dan artikel-artikelnya. Dalam hal ini prinsip suaramuhammadiyah.id sama seperti Muhammadiyah yaitu beramar *makruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan menyegah kemungkaran). Termasuk mengedepankan moderasi dan memasifkan narasi-narasi alternatif yang mencerahkan. Sedangkan NU Online perhatian utamanya sebenarnya bukan untuk memerangi radikalisme. Produksi NU online lebih diarahkan pada bagaimana membuat ajaran-ajaran NU tetap dipeluk oleh mayoritas Muslim Indonesia. Karena bila ajaran atau tafsir ke-Islaman atau ke-NU-an dipeluk oleh mayoritas muslim Indonesia maka tidak akan menjadi radikal. Karena NU itu pada dasarnya *tawasuth*, moderat, toleran, dan menerima Pancasila, serta tidak mendukung bentuk khalifah. Dalam produksi kontra-diskursus radikalisme, NU Online memperbanyak tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang konsep-konsep ke-Islaman yang terkait dengan radikalisme. Misalnya mengenai jihad, khilafah, pemimpin non-muslim, mayotirani Islam, dan mengenai tidak boleh menyerupai orang non-muslim dan sebagainya.

Mengenai konsumsi teks tentang kontra-diskursus radikalisme yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id mengenai isu dasar negara Pancasila secara umum warga dan tokoh Muhammadiyah sebagai pembaca suaramuhammadiyah.id memandang Pancasila sebagai dasar negara yang ideal saat ini karena sesuai dengan ajaran Islam, dan merupakan hasil kesepakatan antarkomponen bangsa. Termasuk Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, yang dipahami kalangan Muhammadiyah merupakan penegasan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berkemajuan yang moderat. Begitu juga dengan konsumsi teks mengenai jihad di mana kalangan Muhammadiyah lebih memahami sebagai berjuang secara sungguh di jalan Allah Swt secara luas, tidak hanya perang. Mereka menyepakati gagasan *jihad lil-muwajahah* yang berarti perjuangan sungguh-sungguh menciptakan sesuatu yang unggul.

Adapun konsumsi teks terhadap NU Online mengenai isu dasar negara oleh kalangan NU (Nahdliyin) menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar

negara dipahami sudah islami, dan merupakan *muahadah wathaniyah* (kesepakatan kebangsaan) yang mengikat semua elemen bangsa. Sedangkan konsumsi teks mengenai jihad, kalangan NU menolak pemahaman jihad sebagai kekerasan, perang, dan terorisme. Mereka lebih memahami jihad sebagai *mabadi' khaira ummah* (mengutamakan kemaslahatan umat) dalam bentuk jihad kontekstual seperti jihad melawan korupsi, melawan narkoba, dan melawan hoaks, serta jihad-jihad kontekstual lainnya.

Ketiga, berdasarkan analisis praktik sosio-kultural (konteks), kontra-diskursus radikalisme yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online mengenai dasar negara dan jihad dilingkupi situasi di mana muncul fenomena kebangkitan kembali gerakan radikalisme di Indonesia pasca-runtuhnya Orde Baru. Kelompok-kelompok muslim radikal ini merebut dan menguasai organisasi Muhammadiyah, NU, dan MUI. Selain itu, kelompok-kelompok muslim radikal seperti MMI, HTI, JAT terus menerus berupaya mendirikan Negara Islam (Khilafah Islamiyah) dan menegakkan syariat Islam di Indonesia, serta menanamkan pemahaman jihad sebagai perang terhadap kaum kafir (non-muslim). Pada konteks yang lain, fenomena menguatnya gerakan radikalisme di Indonesia juga dibarengi dengan langkah-langkah kelompok-kelompok muslim radikal menggunakan media-media massa online dan media-media sosial sebagai media penyebaran gagasan radikalisme. Mereka menggunakan media-media baru (*new media*) untuk mengkonstruksi pandangan-pandangan mereka mengenai isu-isu demokrasi seperti HAM, kebebasan beragama, kelompok minoritas; dan kebebasan berekspresi.

Keempat, media baru berperan penting dalam upaya kontra-diskursus radikalisme di Indonesia. Media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai salah satu bentuk media baru dalam upaya kontra-diskursus radikalisme merepresentasikan diskursus mengenai dasar negara Pancasila dan jihad secara berbeda dengan diskursus yang dimunculkan oleh media-media online kelompok-kelompok muslim radikal. Di samping itu, suaramuhammadiyah.id dan NU Online menunjukkan peran dan fungsi kritis media online. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai media informasi bagi warga Muhammadiyah dan

NU, tetapi juga melakukan kritik ideologi terhadap radikalisme agama sebagai sebuah paham atau ideologi radikal yang harus ditolak di Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil-alamin*.

b. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut. Secara akademis, penelitian ini kajiannya pada level diskursus dan kontra-diskursus (bagaimana bahasa digunakan) dalam masalah radikalisme di media online, dengan metode Analisis Wacana Kritis. Selanjutnya sebaiknya untuk penelitian ini diubah levelnya tidak lagi pada level diskursus tapi level tindakan. Misalnya, tindakan-tindakan nyata apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia untuk melawan radikalisme. Secara teoritis, penelitian seperti ini dapat menggunakan Teori Tindakan dari Max Weber, dan atau Teori Tindakan Komunikasi dari Jurgen Habermas, dengan menggunakan metode penelitian *Participation Action Research* (PAR).

Secara praktis, sebenarnya redaktur suaramuhammadiyah.id dan NU Online sudah banyak menampilkan kontra-diskursus radikalisme mengenai isu dasar negara Pancasila dan jihad dalam berita-berita dan artikel-artikelnya. Upaya ini tetap harus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan frekuensinya memproduksi diskursus-diskursus kontra-radikalisme agar kesadaran anti-radikalisme di kalangan Muhammadiyah dan NU tetap terjaga, terutama para generasi mudanya yang kemungkinan lebih rentan terpapar radikalisme. Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media-media sosial baru, suaramuhammadiyah.id dan NU Online perlu mengadopsi dan mengembangkan bentuk-bentuk teknologi baru tersebut sebagai media diskursus baru, sekaligus sebagai media baru kontra-diskursus radikalisme.

Secara sosial, hasil penelitian ini menunjukkan peran kuat media online suaramuhammadiyah.id dan NU Online sebagai media yang melakukan kontra-diskursus radikalisme. Keduanya merepresentasikan dasar negara Pancasila

konsensus nasional, dan tidak bertentangan dengan Islam, serta makna jihad yang lebih kontekstual tidak jihad perang. Maka dari itu, bagi warga Muhammadiyah dan NU pemahaman mengenai isu dasar negara dan jihad yang direpresentasikan oleh suaramuhammadiyah.id dan NU Online tersebut seharusnya menjadi pemahaman bersama yang mesti diikuti dan diinternalisasikan kepada segenap anggota kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Terutama kepada kalangan generasi muda yang lebih rentan tersusupi paham radikalisme melalui media-media massa baru dan media-media sosial.

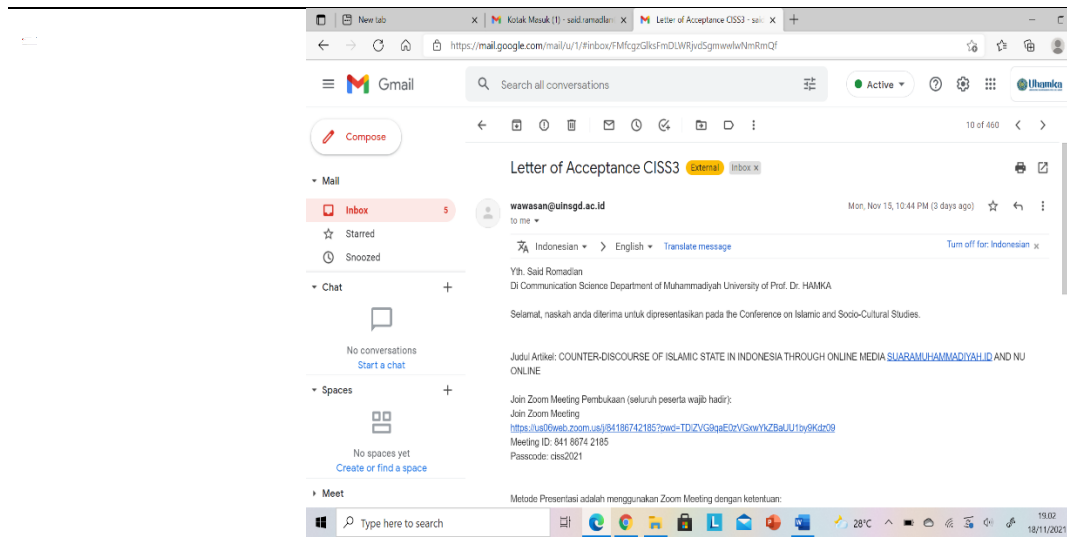
BAB 6. LUARAN YANG DICAPAI

Luaran yang dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Luaran yang Dicapai

IDENTITAS JURNAL	
1 Nama Jurnal	Jurnal Studi Komunikasi dan Media
2 Website Jurnal	e-Journal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)
3 Status Artikel	In Editing
4 Jenis Jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi
5 Tanggal Submit	22 September 2021
6 Bukti Screenshot Submit Artikel	
IDENTITAS SEMINAR	
1 Nama Seminar	1. International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE) 2 2021. 2. The 3rd Conference on Islamic and Socio-Cultural Studies Contestation and Religious Authority in Global Media.
2 Website Seminar	1. https://conference.uhamka.ac.id/lic/ 2. https://fu.uinsgd.ac.id/

3	Status	1. Accepted
	Makalah/Artikel	2. Accepted
4	Jenis Prosiding/ Konferensi	1. Konferensi Internasional 2. Konferensi Internasional
5	Tanggal Submit	1. 15 November 2021 2. 12 November 2021
6	Bukti Screenshot Submit Artikel	11/15/2021  International Conference On Natural And Social Science Education conference.uhamka.ac.id/ic November 18 - 19, 2021 Research and Development Institute, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA LETTER OF ACCEPTANCE Dear, Said Romadlan <i>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.</i> Greetings from ICNSSE 2 2021: International Conference On Natural And Social Science Education. We are pleased to inform you that your paper entitled ANTI-RADICALISM EDUCATION THROUGH ONLINE MEDIA SUARAMUHAMMADIYAH.ID AND NU ONLINE has been accepted for: ORAL PRESENTATION on ICNSSE 2 2021. Please kindly completed your payment Rp.150.000,00 transfer to: Bank Name : Bank Negara Indonesia - BNI Swift Code : BNINIDJA Account Number : 17366489 Name : Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA After completing the payment please upload your payment proof to your account as soon as possible. Your presentation schedule will be added to the conference program upon completion of the payment process. More details about template of presentation and payment process available at https://conference.uhamka.ac.id/lc We are looking forward for welcoming you on ICNSSE 2 2021 by virtually Sincerely,  Dr. Apt. Supandi, M.Si Chairman ICNSSE 2 2021



BAB 7. RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI

Rencana tindak lanjut dan proyeksi hilirisasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Tindak Lanjut dan Proyeksi Hilirisasi

Hasil Penelitian	Penelitian ini termasuk pengembangan keilmuan, khususnya mengenai Teori Diskursus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suaramuhammadiyah.id dan NU Online berperan penting melakukan kontra-diskursus radikalisme dengan merepresentasikan isu-isu radikalisme dengan pemahaman yang berbeda. Suaramuhammadiyah.id menampilkan isu dasar negara yakni Pancasila sebagai <i>darul ahdi wa syahadah</i> (Negara konsensus dan kesaksian), dan mengenai isu jihad sebagai <i>jihad lil-muwajahah</i> (berjuang menciptakan sesuatu yang unggul). Sedangkan NU Online merepresentasikan isu dasar negara dengan Pancasila Islami, dan isu jihad dengan pemahaman jihad kontekstual. Representasi suaramuhammadiyah.id dan NU Online tersebut merupakan kontra-diskursus atas isu Negara Islam dan jihad sebagai perang dari kelompok-kelompok muslim radikal.
Rencana Tindak Lanjut	Rencana tindak lanjut setelah penelitian ini diselesaikan adalah melakukan penelitian lanjutan. Fokus permasalahan penelitian lanjutan tersebut tidak lagi pada level diskursus atau wacana mengenai kontra-radikalisme di media online, tapi pada level tindakan nyata untuk melawan radikalisme. Penelitian lanjutan tersebut akan mengkaji tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU

	sebagai organisasi Islam moderat untuk melawan radikalisme di Indonesia. Selama ini program-program Muhammadiyah yang berkaitan dengan upaya melawan radikalisme disebut moderasi, sedangkan program-program NU dalam upaya yang sama menggunakan istilah deradikalisasi. Dalam penelitian tersebut dapat menggunakan Teori Tindakan dari Max Weber, dan atau Teori Tindakan Komunikasi dari Jurgen Habermas, dengan menggunakan metode penelitian <i>Participation Action Research</i> (PAR). Selanjutnya hasil penelitian ini akan diseminasikan di forum seminar dan diskusi, media massa, dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan untuk dijadikan bahan rujukan mengenai moderasi maupun deradikalisasi.
--	--

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, S. (2005). Profil Pers Islam di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3). <http://eprints.upnyk.ac.id/16987/>
- Afrianty, D. (2012). Islamic education and youth extremism in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 7(2), 134–146. <https://doi.org/10.1080/18335330.2012.719095>
- Ali, A. S. (2014). *Al-Qaeda Tinjauan Sosio-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya* (I). Jakarta: LP3ES.
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Berger, A. A. (2011). *Media and Communication Research Methods an Introduction to Qualitative and Quantitative Approach* (2nd ed.). Singapore: Sage.
- Binfas, Maman A. Majid, Fitriani, S., & Wahjusaputri, S. (2018). Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (NU): Monumental Cultural Creativity Heritage of The World Religion. *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), 173–193. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.173-193>
- Binfas, Maman Abdul Majid, Abdullah, M. S. Y., & Ismail, A. M. (2014). Tapak perbezaan asal usul gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia. *Jurnal Melayu*, 12(1), 14–31. <https://ejournal.ukm.my/jmelayu/article/view/6615/0>
- Burhani, A. N. (2012). Al-Tawassut wa-l I'tidāl: The NU and moderatism in Indonesian Islam. *Asian Journal of Social Science*, 40(5–6), 564–581. <https://doi.org/10.1163/15685314-12341262>
- Burhani, A. N. (2013). Liberal and Conservative Discourses in the Muhammadiyah: The Struggle for the Face of Reformist Islam in Indonesia. In M. Van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam* (pp. 105–144). ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore. <https://doi.org/10.1355/9789814414579-008>
- Castells, M. (2004). *The Power of Identity*. Victoria: Blackwell Publishing.
- Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil Society, communication networks, and global governance. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 78–93. <https://doi.org/10.1177/0002716207311877>
- Castells, M. (2010). The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Network, and Global Governance. In D. K. Thussu (Ed.), *International Communication A Reader* (pp. 36–47). New York: Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data-data Empris. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research (Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi)* (1st ed., pp. 495–500). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devji, F. (2005). *Landscape of Jihad Militancy, Morality, Modernity*. London: Hurst & Company.

- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (1st ed.). Yogyakarta, LKiS.
- Fadli, R. (2019). *Kontra Radikalisme Agama di Dunia Maya (Studi Analisis Portal Online Organisasi Islam dan Pemerintah)* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/9940/>
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. New York: St. Martin's Press Inc.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis the Critical Study of Language*. Edinburgh: Logman Applied Linguistics.
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177–197. <https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239>
- Fikri, Z. (2013). Narasi Deradikalisasi di Media Online Republika dan Arrahmah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11(2), 261–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v11i2.70>
- Flew, T. (2005). *New Media an Introduction*. Victoria: Oxford University Press.
- Fuad, A. F. (2015). Islamisme dan Dakwah di Indonesia: Perspektif dan Pengalaman Dakwah Gerakan Tarbiyah. *Jurnal Ilmu Komunikasi Komunika*, 10(1), 82–92.
- Habermas, J. (2009). The Public Sphere. In S. Thornham, C. Basset, & P. Marris (Eds.), *Media Studies A Reader* (3rd ed., pp. 45–51). Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hasan, N. (2005). September 11 and Islamic Militancy in Post-New Order Indonesia. In K. S. Nathan & M. H. Kamali (Eds.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century* (1st ed., pp. 301–324). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hasan, N. (2008). *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru (Hairus Salim)* (1st ed.). Jakarta: LP3ES-KITLV.
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Hilmy, M. (2013). Whiter Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 7(1), 24. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48>
- Ichwan, M. N. (2013). Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy. In M. Van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam* (pp. 60–104). ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore. <https://doi.org/10.1355/9789814414579-007>
- Karman. (2015). Construction Of Democratic Values By Islam-Based Fundamentalist-Groups In Online Media. *Jurnal Pekommas*, 18(3), 181–190. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2015.1180304>
- Karman, K., & Hamad, I. (2019). Representation of Indonesian Democratic Leaders by Jamā'ah Anṣāru Tawḥīd and Ḥizbut Taḥrīr as Radical Muslim Groups. *Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)*, 307(SoRes 2018), 319–323. <https://doi.org/10.2991/sores->

18.2019.74

- Khatib, L. (2019). Communicating Islamic Fundamentalism as Global Citizenship. In D. K. Thussu (Ed.), *International Communication A Reader* (pp. 279–294). New York: Routledge.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Kusuma, R. S., & Azizah, N. (2018). Melawan Radikalisme melalui Website. *Jurnal ASPIKOM*. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New Media a Critical Introduction*. London and New York: Routledge.
- Lubis, A. A. (2014). *Filsafat Ilmu Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory* (6th ed.). London, Sage Publication.
- Moussa, M., & Scapp, R. (1996). The Practical Theorizing of Michel Foucault: Politics and Counter-Discourse. *Cultural Critique*, 33, 87–112. <https://doi.org/10.2307/1354388>
- Mubarak, M. Z. (2007). *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial (Islamic Radicalism and its Movement on Social Media). *Jurnal Afkaruna*. <https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2015>.
- Nashir, H., Qodir, Z., Nurmandi, A., Jubba, H., & Hidayati, M. (2019). Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election: Critical Views from Within. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.1-24>
- Nurrohman, M. (2019). *Analisis Isi Media NU Online tentang Radikalisme* [UIN Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/10833/>
- Permata, A. N. (2013). Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricoeur. In E. Mulyono, N. Atho', & A. Fakhrudin (Eds.), *Belajar Hermeneutika Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies* (2nd ed., pp. 242–270). Yogyakarta: IRCsoD.
- Rahman, T. (2017). Contextualizing jihad and mainstream Muslim identity in Indonesia: the case of Republika Online. *Asian Journal of Communication*, 27(4), 378–395. <https://doi.org/10.1080/01292986.2016.1278251>
- Ricoeur, P. (2006). *Hermeneutika Ilmu Sosial (Muhammad Syukri)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Romadlan, S., Hamad, I., & Gazali, E. (2020). Perspektif Hermeneutika Ricoeur Menyusuri Agenda Toleransi di Organisasi Islam Nahdlatul Ulama. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 187. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i02.1941>
- Roy, O. (2004). *Globalised Islam The Search for A New Ummah*. London: C. Hurst & Co.
- Salim, A., & Azra, A. (2003). *Shariah and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Santoso, B., & Sjuchro, D. W. (2019). Is Hizb ut-Tahrir Indonesia Part of Islamic Revival? *Komunikator*, 11(1). <https://doi.org/10.18196/jkm.111021>

- Saputra, R., & Nazim, A. M. (2017). Strategi Dakwah Islam melalui Media Online Nahdlatul Ulama. *MALAYSIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES*, 2, 9–18. <https://journal.unisza.edu.my/mjis/index.php/mjis/article/view/22>
- Sefriyono, S. (2020). Jihad Digital: Pembungkahan Narasi Kontra Radikalisasi NU Online di Dunia Maya. *FIKRAH*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.7214>
- Sorensen, S., & Chen, X. (1996). Occidentalism: A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China. *World Literature Today*. <https://doi.org/10.2307/40152267>
- Sukmono, F. G., & Junaedi, F. (2020). Manajemen Konten dan Adaptasi Suara Muhammadiyah di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(2), 248–265. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i2.17845>
- Tiffin, H. (1987). Post-Colonial Literatures and Counter-Discourse. *Kunapipi*, 9(3), 17–34. <https://ro.uow.edu.au/kunapipi/vol9/iss3/4/>
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
- Van Bruinessen, M. (2011). What happened to the smiling face of Indonesian Islam ? Muslim intellectualism and the conservative turn in post-Suharto Indonesia Martin Van Bruinessen S . Rajaratnam School of International Studies Singapore About RSIS. *RSIS Working Paper No. 222, January*, 1–45.
- Van Bruinessen, M. (2013). Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the “Conservative Turn” of the Early Twenty-First Century. In M. Van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”* (pp. 1–20). ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1355/9789814414579-005/html>
- Wijayanti, Y. T. (2020). Radicalism Prevention through Propaganda Awareness on Social Media. *Jurnal ASPIKOM*, 5(1), 142. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i1.501>